



MINGGU III JANUARI 2024

● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

info indonesia

HARGA: @Rp 20.000,-

DEBAT RONDE 2: CAWAPRES GIBRAN 'KANVASKAN' MAHFUD & CAK IMIN



Road to
Election
2024



**MENDAGRI
COPOT PJ KEPALA
DAERAH TIDAK
NETRAL**

**GANJAR
DITINGGAL
RAKYAT
JOKOWI**

**HAK PILIH
RAKYAT
TIDAK BOLEH
DITEKAN**

**PELUANG
BESAR RIDWAN
KAMIL MENANG
DI JABAR**

**MEGAWATI TURUN
GUNUNG
MENANGKAN
GANJAR-MAHFUD**



Satu Putaran

Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah tidak lama lagi. Semua mesin politik mulai bergerak beradu kecepatan, kekuatan dan kekuasaan untuk memperlihatkan siapa akan yang menjadi pemimpin Indonesia nanti.

Hebatnya, meski Pilpres 2024 belum berlangsung, namun tanda-tanda siapa yang akan menang bisa dilihat dengan mata telanjang.

Tidak perlu harus berpendidikan tinggi, tidak harus mengumpulkan literasi politik yang banyak, atau tidak perlu mencari berbagai analisa. Semua terlihat jelas ke mana arah kemenangan itu akan berjalan.

Hanya saja, banyak juga yang meragukan apakah kemenangan itu diraih dengan jalan fair play atau lewat berbagai cara. Kalau pola pertama mungkin bisa dimaklumi, namun yang ditakutkan adalah lewat segala cara.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian besar masyarakat Indonesia yang ingin memilih pemimpinnya dengan jujur sesuai azas pemilu Indonesia yakni jujur dan adil. Dua kata ini menjadi hal yang meragukan dalam politik demokrasi Indonesia.

Apakah nanti akan terjadi lagi pengumuman pemenang pada tengah malam di saat orang terlelap? Jangan sampai hal-hal itu kembali terulang di Pemilu 2024.

Bukan hanya pemenangnya yang bisa ditebak, pelaksanaannya juga bisa diketahui. Meski capres dan cawapres ada tiga pasang, namun sepertinya hanya mengarah ke satu putaran.

Melihat kekuatan yang merata akan mustahil sebetulnya bisa sampai satu putaran. Namun sekali lagi, apa yang tidak mungkin di politik demokrasi Indonesia saat ini.

Berbagai hasil survei menunjukkan pasangan 02, Prabowo-Gibran akan menang besar hingga mampu satu putaran saja.

Pertanyaannya cuma satu, apakah tim pemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak bekerja hingga dikalahkan dengan mudah.

Ini adalah tantangan bagi pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kalau mereka bukanlah pemain kacangan. Faktanya, Ganjar Pranowo yang sempat melejit di awal-awal Pilpres, kini mampu disusul para pesaingnya, berdasarkan hasil survei.

Ini juga menjadi lecutan bagi para tim sukses. Meski banyak yang memprediksi kalau pasangan Prabowo-Gibran akan menjadi pemenang, bahkan dalam satu putaran, mereka harus buktikan kalau prediksi itu salah, kalau hasil survei itu salah.

Hal yang sama juga harus dilakukan tim pemenangan Anies-Muhaimin. Militansi yang ditunjukkan kader partai pendukung harus ditingkatkan lagi. Target dua putaran yang ingin dicapai harus terpenuhi kalau ingin berhasil.

Di sisi lain, banyak juga kader yang mulai patah semangat untuk mengusung calon mereka agar menang. Ada juga yang fokus pada pencalegan saja. Fakta di lapangan banyak di antara mereka yang lebih suka bicara soal pencalonan daripada Pilpres karena dianggap sebuah sandiwara politik yang sudah diketahui siapa pemenangnya.

Pada edisi kali ini, kami mengupas tentang dinamika Pilpres yang mulai mengarah ke satu putaran. Kami juga mengangkat bagaimana sikap optimis partai dan tim pemenangan agar dapat bertarung hingga dua putaran.

Sementara harapan masyarakat Indonesia cuma satu, Pilpres 2024 ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah, jujur dan adil. Selamat membaca!!!





“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, bahwa perolehan suara Anies tidak akan melampaui perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 dan 3”

Fernando Emas

ANIES PASTI KALAH KECUALI DAPAT MUKJIZAT

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tidak pasang target muluk dalam Pilpres 2024.

Pasangan berjuluk Amin ini tengah menunggu mukjizat untuk bisa lolos ke putaran kedua dan memenangkan pesta demokrasi lima tahunan.

“Yang enggak punya target cuma Amin. Pada posisi setengah saja, duduk, tinggal menunggu mukjizat menang di satu putaran atau menang di dua putaran,” ujar Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Jumat, 12 Januari 2024.

Sahroni memprediksi, Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Sebab, ia tidak yakin ada satu kandidat yang dapat meraup suara lebih dari 50 persen di putaran pertama.

“Enggak realistis ya (satu putaran), saya yakin dua putaran,” katanya.

Sahroni menerangkan, penyebab tak ada salah satu kandidat bisa meraup suara lebih dari 50 persen karena jumlah pemilih di Indonesia yang sangat banyak dengan persebaran wilayahnya luas.

“Karena ini negara luasannya seluas-luasnya, maka jangan main-main, jangan main-main juga menarasikan seolah-olah semua bisa (satu putaran), tapi kalau upaya, itu wajar-wajar saja, target ya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Politik, Fernando EMaS, berpendapat, Sahroni sangat pesimistis pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dapat memenangkan Pilpres 2024.

“Wajar kalau Ahmad Sahroni tidak terlalu berharap kepada pasangan capres dan cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memenangkan pilpres 2024,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Sahroni itu tanpa dasar. Melihat hasil dari beberapa survei nasional, memang elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terendah jika dibandingkan dengan pasangan lainnya.

Menurutnya, sangat wajar bila Sahroni sebagai petinggi Partai NasDem yang merupakan partai pendukung Anies Baswedan-

Muhaimin Iskandar merasa khawatir dengan perolehan elektoral pasangan tersebut.

“Ungkapan Ahmad Sahroni tentu berdasarkan pada hasil beberapa lembaga survei, juga sangat mungkin berdasarkan survei dan analisis internal Tim AMIN,” jelasnya.

Dia mengatakan pernyataan Sahroni di media sosial miliknya akan sangat berdampak pada kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menuturkan, seharusnya sebagai petinggi Partai NasDem, Sahroni memberikan optimisme di masyarakat agar pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa memenangkan Pilpres 2024.

“Sebagai salah petinggi pengusung pasangan AMIN tentu pernyataan Sahroni tersebut akan memberikan pengaruh terhadap Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin,” katanya.

Namun, Fernando merasa keheranan dengan sikap Sahroni yang justru menunjukkan pesimistis. Lalu Fernando juga mempertanyakan kapasitas Sahroni yang melontarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, tidak sepatutnya Sahroni mengatakan hal tersebut.

Kata Fernando, pernyataan Sahroni ini secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seharusnya, lanjut Fernando, Sahroni mendukung keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang all out mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Sebagai kader partai yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar seharusnya Sahroni juga memberikan semangat kepada seluruh pendukung dan paslon yang didukung untuk bisa memen-

angkan Pilpres 2024 yang hanya tinggal 28 hari lagi.

“Menjadi pertanyaan, apakah pernyataan Sahroni tersebut juga merupakan representasi dari Surya Paloh? Sebagai salah satu petinggi Partai NasDem tentu tidak secara sembarangan mengungkapkan pada publik tentang peluang Anies-Muhaimin yang hanya berharap mukjizat,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa pernyataan yang dilontar oleh Crazy Rich Tanjung Priok itu akan mengendurkan semangat para pendukung, relawan, dan simpatisan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Bagaimanapun juga, pernyataan Sahroni tersebut akan mengendurkan se-

mangat berjuang Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin dan para relawan,” katanya.

Namun, di sisi lain, Fernando sependapat dengan pernyataan Sahroni soal elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang paling terendah.

Maka dari itu, dibutuhkan kekuatan dan pengaruh yang besar untuk bisa mendongkrak elektoral dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kata Fernando, kurang 28 hari jelang pencoblosan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar harus mengejar ketertinggalan elektabilitasnya dengan pasangan lainnya.

Pertarungan Pilpres ini, lanjut Fernando sangat berat bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebab, lanjut Fernando, sulit bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mengejar ketertinggalan elektoralnya.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, bahwa perolehan suara Anies tidak akan melampaui perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 dan 3,” katanya.

Dia memprediksi bahwa yang akan masuk Pilpres putaran kedua adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada faktor-faktor penyebab pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa lolos ke putaran kedua.

“Sehingga pasangan capres dan cawapres yang akan masuk putaran kedua adalah nomor urut 2 dan 3. Sampai saat ini sangat kecil peluang pasangan Amin bisa mengungguli pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar-Mahfud,” tandasnya. ●RDO



“Saat ini saja elektabilitas sudah di atas 40 persen, maka ketika 22 juta suara targetnya tercapai, kita yakin kemenangan satu putaran”



Achmad M Arief Rosyid Hasan

OPTIMISTIS MENANG SATU PUTARAN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu di Pilpres 2024.

Mereka juga menyatakan tidak mempedulikan jika kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahud MD berkoalisi di putaran kedua.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan, bicara soal kemungkinan-kemungkinan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam satu putaran Pilpres 2024.

Dia mengatakan, kemungkinan Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran belum bisa dipastikan. Sebab, berdasarkan hasil survei nasional, elektabilitas pasangan ini belum di atas 50 persen.

“Peluang Prabowo-Gibran menang satu putaran masih 50:50,” katanya.

Dia mengatakan Prabowo-Gibran dapat memenangkan Pilpres dalam satu putaran jika elektabilitasnya di atas 50 persen. Di waktu yang tersisa jelang pencoblosan ini, kata Yusak, Prabowo dan Gibran harus terus berupaya mendongkrak elektabilitasnya.

“Prabowo-Gibran berpeluang memenangkan pilpres satu putaran jika dalam satu bulan terakhir ini mampu memompa elektabilitas,” katanya.

Menurutnya, setidaknya Prabowo-Gibran hanya perlu kurang dari 10 persen untuk bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Kini, dari beberapa survei, elektabilitas Prabowo-Gibran di posisi 45-50 persen.

“Prabowo-Gibran hanya butuh sekitar 7-8 persen lagi untuk menang satu putaran,” katanya.

Dia menjelaskan, elektabilitas Prabowo-Gibran yang masih stagnan di posisi 45 persen ini ada faktor psikologis dari pemilih.

“Ada banyak faktor yang membuat elektabilitas Prabowo-Gibran belum mampu menyentuh angka psikologis menang, 50 persen plus satu,” katanya.

Dia menjelaskan faktor elektoral Prabowo-Gibran yang tidak ada perubahan karena masih banyak pemilih yang bimbang atas pilihannya. “Pertama, proporsi swing voters yang masih cukup tinggi. Begitu juga dengan undecided voters,” jelasnya.

Dia meyakini mendekat hari pencoblosan, rasio pemilih yang bimbang atas pilihannya tentu akan semakin berkurang. Dengan berjalannya waktu, pastinya pemilih akan menentukan pilihannya secara pasti.

“Semakin mendekati hari pemungutan suara, jumlah swing voters tentu akan menurun. Prabowo-Gibran harus mampu merebut pasar swing voters jika ingin menang satu putaran,” ujarnya.

Dia mengatakan faktor lain yang mempengaruhi adalah sentimen negatif yang ciptakan oleh pendukung kubu 01 dan 03 terhadap pasangan Prabowo-Gibran. “Kedua, strategi ofensif atau menyerang dari paslon 01 dan 03 yang cukup agresif menguliti Prabowo terutama di dunia maya,” terangnya.

Dia mengatakan, Prabowo-Gibran dijadikan musuh bersama oleh kubu 01 dan 03. Kata Yusak, hal ini juga yang mempengaruhi elektabilitas pasangan 02 tidak beranjak dari 40 persen.

“Prabowo-Gibran tampak dijadikan common enemy dari paslon 01 dan 03 sehingga memperlambat kenaikan elektabilitas,” katanya.

Selain itu, faktor selanjutnya adalah partai politik pendukung pasangan Prabowo-Gibran belum solid. Seharusnya, dengan koalisi gemuk, Prabowo-Gibran bisa memperoleh elektabilitas lebih mudah dengan dukungan dari para caleg parpol p e n - dukung.

“Ketiga, parpol-parpol yang bergabung dalam KIM tampak belum maksimal mengkampanyekan Prabowo, padahal postur KIM termasuk yang paling gemuk,” ujarnya.

Faktor yang terakhir yakni Presiden Jokowi juga belum berperan aktif dalam mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Kata Yusak, Presiden Jokowi perlu turun gunung jika ingin Prabowo-Gibran menang Pilpres satu putaran.

“Keempat, variabel Jokowi belum tampak optimal. Jokowi harus turun langsung secara terbuka jika Prabowo-Gibran ingin menang satu putaran,” katanya.

TKN Prabowo-Gibran sendiri tidak mempermasalahkan jika kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berkoalisi di putaran kedua.

“Monggo silakan (komunikasi), ra popo,” kata Sekretaris TKN Nusron Wahid melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin, 15 Januari 2024.

Dia mengatakan bahwa Prabowo-Gibran lebih fokus kepada berkomunikasi dengan rakyat. “Saat ini Prabowo-Gibran lebih senang berkomunikasi dengan rakyat langsung, baik formal, non formal, dan informal,” kata Nusron.

TKN Prabowo-Gibran berharap Pilpres 2024 dapat berjalan dalam satu putaran untuk menghemat biaya. “Kami berupaya menghemat uang rakyat Rp27 triliun dengan menjadikan pilpres ini cukup sekali putaran,” ujar Nusron.

Dia mengatakan, jika Pilpres satu putaran, sisa dari alokasi anggaran untuk Pilpres dua putaran bisa untuk kepentingan masyarakat.

“Bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti bantuan sosial dan program lain. Apalagi setelah Pilpres itu kita masuk bulan Ramadhan dan Lebaran,” kata Nusron.

Dia mengatakan, Pilpres dua putaran akan berdampak pada stabilitas politik. Kendati begitu, kata Nusron, semua keputusan dalam perjalanan demokrasi ini berada di tangan rakyat.

“Hak rakyat kalau menginginkan gonjang ganjing politik ini cepat selesai,” katanya.

Sementara itu, TKN Fanta Prabowo-Gibran menargetkan suara 22 juta pemilih muda untuk meraih keme-

nangan satu putaran Pilpres 2024. Sisa kampanye kurang dari sebulan, Tim Fanta mengoptimalkan seluruh platform media sosial untuk menarik simpati publik dan meyakinkan pemilih muda.

Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, M Arief Rosyid Hasan, mengatakan, timnya memiliki platform pemilihmuda.id yang bertujuan memonitoring dan menjemput atau mengajak pemilih muda untuk bersama-sama menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Platform pemilihmuda.id itu digerakkan oleh sukarelawan yang tersebar di puluhan kota besar di Indonesia dengan cara mendengarkan dan menghimpun aspirasi anak muda.

“Kami melakukan inventarisasi target pemilih muda dimulai daerah pemilihan. Relawan turut mengajak pemilih dan mendata mereka. Bahkan, relawan meminta mereka itu untuk menyampaikan aspirasi dalam platform tersebut,” kata Arief saat Peluncuran Program Magang Virtual Pemilih Muda Berbasis Project bersama TKN Fanta di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Dalam proses inventarisasi itu, para sukarelawan di TKN Fanta mendatangi tempat-tempat kumpul para anak muda, seperti warung kopi, kafe, rumah toko (ruko), dan di tempat lainnya. Hal ini untuk menyerap aspirasi dari para pemilih muda. Aspirasi yang sudah terekam itu menyangkut masalah yang sering dialami oleh anak muda, seperti kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lingkungan.

“Kita berharap bisa mencapai target suara 22 juta pemilih muda untuk kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran. Saat ini saja elektabilitas sudah di atas 40 persen, maka ketika 22 juta suara targetnya tercapai, kita yakin kemenangan satu putaran,” kata Arief.

Menurut Arief, aspirasi yang disampaikan oleh pemilih muda paling banyak diterima adalah keluhan lapangan pekerjaan. Tersedianya lapangan pekerjaan ini merupakan komitmen Prabowo-Gibran jika nanti terpilih dalam Pilpres 2024. “Kebutuhan anak muda itu, ya, pekerjaan. Tiap tahun ada jutaan anak muda yang telah menyelesaikan kuliah sarjana ataupun SMK (sekolah menengah kejuruan). Tapi, bagaimana penyerapannya di dunia pekerjaan? Kami melihat ini masalah yang harus diselesaikan,” tutur Arief.

Arief mengakui, pendukung Prabowo-Gibran dari kalangan anak muda masih terfokus di wilayah perkotaan. Meski demikian, para tim dan sukarelawan terus mendatangi pemilih muda dengan berbagai latar belakang di berbagai daerah. Bahkan, beberapa waktu lalu menerima dukungan dari buruh perkebunan berusia muda di wilayah Sumatera.

Untuk memaksimalkan suara pemilih muda dari kalangan desa, pihaknya segera merancang dan meluncurkan program khusus untuk mengajak anak muda desa agar lebih merasakan kebanggaan terhadap wilayahnya.

“Sejak November, TKN Fanta diluncurkan dan bekerja secara terus-menerus, sudah menghasilkan kerja positif dalam menjaring pemilih muda. Kita manfaatkan semua platform dan cara agar informasi tentang Prabowo-Gibran sampai kepada para pemilih muda,” ujar Arief.

●RDO





“Kalau untuk
relawan, itu hak
masing-masing”

Arsjad Rasjid

GANJAR DITINGGAL RAKYAT JOKOWI

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, terus melakukan safari politik untuk menggaet dukungan masyarakat. Namun, nampaknya safari politik yang dilakukannya akan percuma karena berdasarkan hasil survei nasional, Ganjar akan terdepak pada putaran pertama.

Ganjar masuk gelanggang Pilpres 2024 karena dianggap merepresentasikan Presiden Joko Widodo. Namun, kini masyarakat tidak lagi percaya karena banyak program Presiden Jokowi yang tidak dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029.

Namun, kini Ganjar Pranowo harus berjuang cukup keras karena Presiden Jokowi tidak mendukungnya di Pilpres 2024. Kata Efriza, Presiden Jokowi sudah sangat terlihat mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Sayangnya, Ganjar harus berjuang keras dan menerima fakta pahit. Jokowi mengusung rivalnya, Prabowo, sekaligus tak mencegah anaknya yaitu Gibran sebagai cawapres,” kata analis politik Citra Institute, Efriza, Selasa, 16 Januari 2024.

Efriza berpendapat, dengan hilangnya dukungan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo akan sulit memenangkan Pilpres 2024. Sebab, kebanyakan pendukung PDIP merupakan pemilih Presiden Jokowi.

“Dengan kehilangan sosok Jokowi yang berpengaruh mendongkrak keterpilihan Ganjar, berdampak pula pada dukungan basis pemilih PDIP yang terkoyak,” katanya.

Pemilih yang masih ragu, dari latar nasionalis, maupun pendukung Presiden Jokowi juga kian menunjukkan enggan mendukung Ganjar Pranowo. Kata Efriza, Ganjar Pranowo lambat-laun mulai kehilangan pendukungnya, rakyat mulai enggan mendukung.

Sikap keras PDIP terhadap pemerintah dengan nyinyirannya, ditengarai turut membawa Ganjar Pranowo juga merespons keras kepada Pemerintahan Jokowi. Padahal pemerintahan ini lahir dari rahim PDIP. Ganjar Pranowo lambat-laun menyadari strategi ini malah membuat dirinya perlahan menyusut dukungan dari masyarakat.

“Ini membuka celah Anies memperoleh simpatik, di tengah situasi Ganjar mulai kesulitan merebut hati rakyat. Anies akhirnya berhasil memepet Ganjar, Anies malah menguat masuk putaran kedua,” ujarnya.

Ganjar Pranowo ditinggalkan rakyat dan Presiden Jokowi sebenarnya banyak faktor. Salah satunya ketika hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah tidak lagi harmonis.

“Sayangnya bandul kedekatan Ganjar Pranowo menguat ke Megawati. Ini yang mengawali kekecewaan Jokowi mulai membesar kepada Ganjar Pranowo,” katanya.

Berikutnya, lanjut Efriza, PDIP enggan membangun koalisi besar yang disokong oleh banyak partai, sebagai bentuk simbol sekaligus dukungan pemerintah. Presiden Jokowi juga ternyata kehilangan pengaruhnya terhadap Ganjar Pranowo, karena telah menunjukkan keengganannya mengikuti strategi politiknya.

“Seperti relawan Jokowi yang diabaikan oleh Ganjar sampai Jokowi sebagai patron juga dipinggirkan oleh Ganjar,” jelasnya.

Ganjar Pranowo menciptakan tembok pemisah yang tinggi antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo merasa tidak ada hutang budi dengan Presiden Jokowi.

“Ia terpilih sebagai capres bagi Ganjar karena Megawati bukan diendorse oleh Jokowi. Sehingga, Jokowi akhirnya benar-benar balik badan terhadap Ganjar, karena keangkuhan Ganjar dalam bersikap terhadap Jokowi,” ucapnya.

Sayangnya, Ganjar Pranowo malah tidak mendapatkan simpatik dari masyarakat. Kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, tidak dianggap sukses, baik oleh masyarakat Jawa Tengah dan juga oleh masyarakat di berbagai daerah.

Masyarakat juga ternyata masih banyak yang mendukung Prabowo Subianto. Sikap arogansi Ganjar Pranowo dan PDIP menyerang Presiden Jokowi, berdampak luas karena kehadiran Gibran Rakabuming Raka dan narasi Prabowo Subianto sebagai pelanjut dari pemerintahan Jokowi mendapatkan sentimen positif.

“Dukungan yang awalnya Prabowo menguat secara personal semakin menguat karena dianggap simbol capres yang diendorse pemerintah,” katanya.

Ganjar Pranowo juga menghadapi situasi dilematis, ternyata pilihan mencawapreskan Mahfud MD tidak dapat berdampak besar, karena masyarakat pasca dua periode kepemimpinan PDIP malah kecewa, dan bersikap kritis.

Masyarakat
menyukai
Mahfud MD
tapi tidak
dengan
PDIP.

Masyarakat juga kurang menyukai Ganjar Pranowo. PDIP juga kurang bisa memaksimalkan Mahfud MD karena posisi dilematis berada di pemerintahan tapi menyering pemerintah. Disebut representasi pemerintah tetapi di Pilpres 2024 ternyata berseberangan dengan pemerintah.

“Ini yang juga memengaruhi rakyat tidak suka dengan ketidaktegasan pasangan Ganjar-Mahfud,” terangnya.

Nyatanya, mesin politik Ganjar Pranowo juga tidak maksimal, karena kekuatannya hanya berharap kepada PDIP. PPP yang berada di Senayan juga tidak bisa banyak membantu, karena partai ini sedang berjuang secara internal unruk lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

PPP juga ternyata akar rumputnya memang menempatkan posisi Ganjar Pranowo sebagai urutan ketiga yang pertama adalah Prabowo Subianto selanjutnya Anies Baswedan. Sedangkan, Hanura dan Perindo tidak bisa diharapkan mendongkrak elektabilitas untuk Ganjar, karena masih partai nol koma.

“Satu-satunya harapan Ganjar hanya melalui caleg-caleg PDIP, mesin politik partainya sendiri, karena-”

na suara partainya diperkirakan mengalami kenaikan meski tak banyak dan tetap berada di peringkat pertama,” katanya.

Namun sayangnya, kader-kader PDIP yang solid, sudah terjebak dengan kewajiban untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Selain itu, para kader PDIP juga mengalami kesulitan menembus wilayah yang dikuasai oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Menurut Efriza, situasi ini yang sedikit banyak membuat caleg-caleg PDIP tidak bisa menjalankan keduanya dengan baik yakni memenangkan Ganjar sekaligus dirinya. Wajar, lambat-laun Ganjar Pranowo hanya dijadikan prioritas kedua oleh kader yang sekaligus caleg PDIP.

“Akhirnya, Ganjar suaranya dalam berbagai survei sebesar 23 persen, kurang lebih mirip suara partainya di pileg, ini menunjukkan elektabilitas personal Ganjar-Mahfud sebagai capres-cawapres tidak berdampak besar, malah sumbangan terbesar dari PDIP,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), Arsjad Rasjid, menyatakan Ganjar Pranowo tak ambil pusing ditinggalkan relawan Jokowi yang lebih memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Kalau untuk relawan, itu hak masing-masing,” kata Arsjad.

Ia menerangkan Ganjar justru akan lebih mengarusutamakan legasi yang telah ditorehkan Jokowi selama dua periode kepemimpinan. Maka keberlanjutan program Jokowi hendak dilanjutkan Ganjar, bukan bacapres lainnya.

“Kami ingin menjaga keberlanjutan pembangunan ini,” ujarnya.

Tim sukses Ganjar saat ini hanya ingin fokus pada kemenangan sekaligus memastikan program yang sudah berjalan dilanjutkan jika terpilih nanti.

“Tantangan ekonomi berat, dan Indonesia butuh program yang jelas untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” kata dia. •RDO



“Menurut saya program slepet itu sebenarnya progresif tapi susah positioning-nya untuk voters, khususnya anak muda, karena maknanya bisa jadi ribet dan rumit”

Surokim Abdussalam



POLITIK SLEPET KURANG NYLEPET

Muhaimin Iskandar menyatakan siap slepet kondisi Indonesia jika nantinya memenangkan Pilpres 2024. Istilah slepet yang dimaksudkan Cak Imin adalah perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik.

Menurut calon wakil presiden nomor urut 02 pasangan Anies Baswedan ini, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu adanya perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

“Tugas saya dan Mas Anies nyelepet keadaan untuk mewujudkan hal-hal baik di Indonesia,” kata Cak Imin saat acara Konsolidasi Akbar Anies & Muhaimin AMIN Jawa Timur di DBL Arena Surabaya, Rabu, 10 Januari 2024.

Dia menyampaikan, beberapa hal yang perlu “dislepet” adalah soal kepastian hukum di masyarakat, khususnya untuk rakyat miskin. Kata Cak Imin, masih ditemukan rekayasa dalam hukum bagi rakyat yang lemah.

“Selama masih ada rekayasa maka negara tidak akan maju,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kepastian hukum ini menjadi indikator yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Cak Imin mengatakan, jika tidak ada kepastian hukum, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Sehingga, investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

“Ekonomi tidak akan tumbuh selagi tidak ada kepastian hukum,” ucapnya.

Tak hanya itu, Cak Imin menyebut bersama Anies Baswedan siap untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) jika diberikan kepercayaan oleh publik memimpin pemerintahan Indonesia pada 2024-2029.

Dia mengatakan, pungli atau korupsi ini menjadi tantangan serius bagi sebuah pemerintahan. Dengan adanya korupsi, negara tidak akan bisa maju. Selain itu, membuat masyarakat kesusahan. Maka di 2024, kata Cak Imin, Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah dan tegas terhadap tindak korupsi.

“Kemudian pembersihan pungli agar kepercayaan publik tumbuh, industri akan maju. Kita butuh pemimpin yang amanah, jujur, dan shiddiq,” kata Cak Imin.

Masih di kesempatan yang sama, Cak Imin meminta kepada seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk terus mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Dia meminta kepada seluruh kader

untuk mengawal suara AMIN di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena kerap terjadi kecurangan.

“Awasi titik-titik rawan. Pertama adalah tempat pemungutan suara (TPS) dan kemudian kawal distribusi suara sampai ke nasional. Kalau pemilu bersih maka pemerintahan yang dipercaya rakyat terwujud,” ucapnya.

Sementara itu, Penelitian Politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengaku tidak memahami dengan jelas program slepet Cak Imin. Menurutnya, program slepet AMIN tidak memiliki makna yang kuat.

“Malah saya kurang paham yang dimaksud Cak Imin slepet itu apa, Bahasa Jawa apa makanan Jawa atau apa saya juga bingung,” kata Surokim.

Dia menilai, pemaknaan slepet pada program Cak Imin kurang tepat. Apalagi, maknanya sangat kurang dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, para pemilih muda juga tidak begitu yakin dengan program slepet ala Cak Imin itu karena tidak mewakili kepentingan mereka.

Kata Surokim, pemilih muda akan menilai bahwa program slepet Cak Imin ini sangat sulit untuk dipahami. Sebab, program tersebut tidak memiliki gaya yang kuat terhadap pemilih muda.

“Menurut saya program slepet itu sebenarnya progresif tapi susah positioning-nya untuk voters, khususnya anak muda, karena maknanya bisa jadi ribet dan ru-

gan calon.

“Jika dilihat dari situ maka pilihan diksi kata slepet itu malah akan merumitkan dan bisa potensial nyerimpeti karena butuh banyak penjelasan diksi kata lain,” ujar Surokim.

Dia menerangkan, seharusnya program slepet dapat dijadikan Cak Imin sebagai semangat untuk mewujudkan visi-misi. Selain itu, alangkah baiknya Cak Imin terlalu muluk-muluk saat memberikan janji politiknya kepada masyarakat.

“Harusnya program itu punya spirit perbaikan dan daya dorong perbaikan dan lebih simple-simple saja, tidak terlalu muluk-muluk dan rumit asal solutif dan punya daya persuasi untuk anak muda milenial,” terang Surokim.

Soal program Cak Imin yang ingin

membangun 40 kota setara seperti DKI Jakarta, kata Surokim, hal itu merupakan janji politik yang tidak masuk akal.

“Ya itu yang saya maksud ide-idenya kelewat progresif, tapi terlalu tinggi, sehingga tidak membumi,” kata Surokim.

Dia juga menyarankan agar Cak Imin lebih berhati-hati dalam janji politiknya kepada rakyat. Dia menyarankan agar Cak Imin lebih realistis dan tidak terlalu ambisius.

“Jika tidak hati-hati hal seperti itu malah akan mengurangi makna gagasan perubahan yang bisa dianggap tidak masuk akal,” kata Surokim.

Dia mengatakan bahwa gagasan-gagasan politik Cak Imin harusnya berkesinambungan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

“Saya pikir perlu ide penjemabatan agar ide itu tidak melip dengan membuat jangka waktu menengah dan panjang. Jika gagasan itu terlalu melip dan sulit dieksekusi, saya pikir akan mengurangi gagasan-gagasan baik yang sudah diusung selama ini,” beber Surokim.

Dia menambahkan, jika Cak Imin tetap mempertahankan gaya politiknya yang seperti itu, maka akan ditinggalkan para pemilihnya. Sehingga, para pemilihnya nanti akan bergeser untuk mendukung paslon lainnya.

“Ya kalau ide kian susah dipahami dan susah dieksekusi, akhirnya ya akan menurunkan trust publik dan pada gilirannya akan menurunkan daya pilih karena tersedia alternatif pilihan yang lain,” tandas Surokim.

•RDO





“Untuk persiapan kan dari awal juga kami sudah bilang bahwa persiapannya itu makan yang enak-enak, terus bercanda yang lucu-lucu, nonton video yang lucu-lucu”

Silfester Matutina

GIBRAN SIAP LAHIR BATIN DEBAT CAWAPRES KEDUA

Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah sangat siap menghadapi debat cawapres kedua yang akan berlangsung pada 21 Januari 2024.

Meski mengaku telah menyiapkan diri, Gibran enggan membeber lebih detil terkait persiapan apa yang telah dilakukannya bersama tim.

“Sudah, sudah disiapkan,” kata Gibran di sela-sela acara blusukan menemui warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024.

Debat keempat yang digelar KPU akan kembali menghadirkan cawapres yang berada gagasan soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Teritorial Prabowo-Gibran, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pihaknya tidak akan menyerang cawapres lain saat di debat nanti. Dia juga memastikan bahwa Gibran tidak akan menggunakan singkatan-singkatan asing.

“Ya kita sepakat sampai sejauh ini memang begitu, ya,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa, 16 Januari 2024.

Doli mengungkapkan, Gibran akan mengedepankan edukasi politik kepada masyarakat melalui debat tersebut. Dia mengklaim Gibran akan menjalankan debat yang sopan dan pantas.

Dia menegaskan, pada debat keempat cawapres nantinya, TKN berharap seluruh cawapres lebih mengedepankan etika dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kita ingin juga belajar, debat itu juga memberikan political education ya tentang etika, tentang bagaimana sopan santun, memilih kata-kata yang pantas, kan itu yang harus kita juga terus meneruskan, kasih pembelajaran ke masyarakat kita,” ucapnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, juga mengklaim tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Gibran jelang debat cawapres.

Silfester menyebut untuk mempersiapkan diri jelang debat, Gibran hanya makan makanan enak hingga nonton video-video lucu.

“Untuk persiapan kan dari awal juga kami sudah bilang bahwa persiapannya itu makan yang enak-enak, terus bercanda yang lucu-lucu, nonton video yang lucu-lucu,” kata Silfester di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2024.

Menurut Silfester, hal ini dilakukan karena putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut memang telah menguasai tema. Kata Silfester, Gibran sebagai kepala daerah pastinya sangat memahami tema yang akan diangkat pada debat cawapres kedua.

“Karena menurut kami Mas Gibran sudah menguasai, ini anak muda yang memang hebat gitu lho,” katanya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa mereka tetap akan menggunakan singkatan pada debat keempat pilpres 2024.

“Nanti tentunya suatu singkatan atau istilah yang umum pasti akan dipakai,” kata Wakil Bendahara Umum TKN, Bobby Gafur Umar, ditemui usai Press Conference Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta Theatre pada Rabu, 10 Januari 2024.

Namun, menurutnya, Gibran akan menggunakan singkatan yang bersifat umum, seperti

NZE (net zero emission), yang seharusnya dipahami oleh paslon lain. “Misalnya NZE, net zero emission, itu kan umum. Harusnya ngerti lah,” katanya.

Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno juga mengaku optimistis Gibran Rakabuming Raka dapat mengulangi keberhasilan saat sesi debat cawapres bertema ekonomi pada akhir Desember tahun lalu.

Eddy mengatakan, pembahasan tema pada debat cawapres kali ini memberikan keuntungan bagi pasangan Prabowo-Gibran. Alasannya, tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa merupakan pembahasan rutin di pemerintahan tingkat lokal.

Dia mengatakan, Gibran yang merupakan kepala daerah menjadi modal besarnya untuk menghadapi debat cawapres kedua. Menurutnya, Gibran sudah sangat men-

uasai tema debat yang akan diangkat.

“Meski ini isu nasional, Mas Gibran tentu sudah paham karena tema itu beririsan dengan tugasnya sebagai kepala daerah di Solo,” kata Eddy kepada wartawan pada Selasa, 16 Januari 2024.

Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi Energi dan Lingkungan DPR ini juga memberi masukan kepada Gibran yang berkaitan dengan tema ketahanan dan transisi energi.

Dia juga mengaku membuat bahan dan materi terkait tema ketahanan dan transisi energi untuk putra sulung Presiden Jokowi itu dalam menghadapi debat cawapres.

“Termasuk pengelolaan dan ketahanan sumber daya alam, itu bagian yang saya siapkan untuk bahan dan materi untuk dipelajari Mas Gibran,” ujar Eddy.

Eddy menjelaskan, mekanisme transisi energi nasional perlu mengoptimalkan sejumlah potensi gas bumi sebagai energi fosil yang lebih rendah emisi ketimbang batu bara dan minyak bumi.

Rencana transisi energi juga perlu dipercepat lewat pengadaan jaringan gas dan transmisi PLN yang masif. Menurut Eddy, dua fasilitas itu merupakan instrumen untuk mengangkut gas dan listrik dari hasil energi terbarukan dari daerah ke wilayah industri dan perkotaan.

Dia menjelaskan perlahan-lahan Indonesia harus menggunakan energi yang ramah lingkungan. Apalagi, permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, ini penting untuk dibahas di dalam debat cawapres kedua.

“Ini perlu terutama untuk daerah industri yang membutuhkan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan sebuah produk ramah lingkungan karena tuntutan dari konsumen,” kata Eddy. ●RDO



“Mahfud mengingatkan kita akan sosok cawapres Jusuf Kalla, di periode pertama SBY, JK yang lebih berperan besar, sehingga JK sempat dianggap the real president”

Efriza



MAHFUD CAWAPRES RASA CAPRES

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, memiliki sikap seperti pemimpin. Ketika para pasangan calon saling sindir, Mahfud tetap tenang dan ikut dalam dinamika politik yang terjadi.

“Lihat saja ketika ramai-ramai PDIP menghujat Presiden Jokowi, ia tetap melindungi pemerintah ini, tak ada Mahfud menghujat Presiden Jokowi terkait putusan MK, misalnya,” kata Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Efriza.

Efriza menuturkan, sikap kepemimpinan Mahfud MD juga terlihat ketika debat cawapres perdana. Dia pun tidak ikut dalam rivalitas antara Gibran Rakabuming Raka dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dia mengatakan, pada debat cawapres perdana lalu, Mahfud lebih memilih untuk menyampaikan gagasannya ketimbang saling sindir antar paslon.

“Di debat cawapres juga Mahfud menunjukkan sikap santun dan bijak, ia tak tampak rivalitasnya dengan Gibran, ia juga ketimbang menghujat pemerintahan sekarang lebih memilih menawarkan gagasan,” kata Efriza.

Dia menyampaikan, sikap Mahfud tentu saja berbeda dengan Ganjar Prnaowo. Kata Efriza, Ganjar Pranowo acap kali melakukan serangan kepada Prabowo Subianto dan pemerintahan Presiden Jokowi.

“Begitu juga dengan sikap PDIP melalui Hasto sebagai Sekjen akan terus menghujat pemerintah,” kata Efriza.

Mahfud juga sudah menyatakan, ia menolak untuk meninggalkan kursi Menko Polhukam. Ia sudah menjelaskan akan menyelesaikan tugas besar yang sedang dijalankannya.

“Sehingga andai dia terpilih sebagai pemenang di Pilpres, maka ia tetap ingin bersama Jokowi sampai akhir masa jabatan Menko Polhukam,” ujar Efriza.

“Ini menunjukkan Mahfud orang yang kukuh dalam kepribadian dan perilaku yang dia pilih. Mahfud bukan politisi yang pragmatis, ia sosok profesional pekerja. Figur Mahfud inilah yang memghadirkan simpatik masyarakat, wajar Mahfud masuk dalam kategori tokoh favorit masyarakat,” beber Efriza menambahkan.

Kata Efriza, dengan pengalaman Mahfud di tiga lembaga yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diyakini akan mewarnai pemerintahan ke depan jika Ganjar-Mahfud terpilih.

Dia menilai, Mahfud bukan sosok seperti Ma'ruf Amin, yang bisa menerima diposisikan sebagai cawapres untuk hanya

mengkomunikasikan kebijakan pemerintahan.

“Mahfud mengingatkan kita akan sosok cawapres Jusuf Kalla, di periode pertama SBY, JK yang lebih berperan besar, sehingga JK sempat dianggap the real president. JK juga mencolok di era Jokowi, Pemerintahan Jokowi riuh-rendah karena Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berpengaruh,” kata Efriza.

Mahfud sosok politisi non partai, artinya ia berdiri untuk kepentingan masyarakat seperti yang ditunjukkannya selama ini. Hal itu berbeda dengan Ganjar yang harus mengayuh kepentingan dari PDIP maupun partai-partai lain di pemerintahan sebagai konsekuensi politisi partai.

“Mahfud akan dapat menjadi sosok cawapres rasa capres. Ganjar yang selama ini nurut saja, sebagai petugas partai, akan tak bisa sepenuhnya menuruti perintah partainya. Hal pertama, ditengarai misalnya, soal jatah PDIP sebagai menteri dari proporsi jumlah dan bidangnya,” jelas Efriza.

Kata Efriza, Mahfud tentu akan berperan untuk mengoreksi alokasi jumlah, sosok siapa yang layak dipilih menjadi menteri. Dia menyakini presentase sosok yang menjabat menteri adalah senior partai politik dan sosok paling berperan di tim sukses.

“Mahfud akan mendorong the right man on the right place, sehingga wajah dari pemerintahan zaken kabinet memungkinkan terjadi karena campur tangan Mahfud. Pun juga pemerintahan ini juga tentu misalnya dalam menamban komposisi jumlah partai pendukung pemerintah dan jatah menteri, diyakini Mahfud juga akan ikut campur,” kata Efriza.

Mahfud diyakini akan berperan menjadi koordinator sekaligus penentu kebijakan atas pembuatan undang-undang dari inisiasi pemerintah. Dia menilai, Mahfud tidak akan mau jika dirinya tidak

mengetahui rencana proses pembuatan undang-undang dan tidak mengetahui perkembangannya.

“Bahkan Mahfud memungkinkan sebagai komunikator dari pemerintahan. Sehingga memungkinkan Ganjar perannya akan lemah dalam proses ini. Mahfud juga memungkinkan menjadi pintu negosiasi dari civil society qtas riuh-rendah kritik dan masukan kepada pemerintah,” kata Efriza.

“Mahfud juga yang akan mengoreksi kebijakan pemerintah lebih awal. Ia akan memerankan sebagai seorang komunikator pemerintah, dan juga yang sekaligus mengkritisi pemerintah. Ini menunjukkan pemerintahan ke depan akan sulit di setir oleh PDIP, faktor Mahfud yang akan memungkinkan PDIP kembali akan memilih strategi sebagai mitra kritis pemerintah. Diyakini Fraksi PDIP akan banyak bersuara, karena jengah dengan besarnya pengaruh Mahfud,” tambah Efriza.

Sementara itu, Ganjar diyakini akan lebih banyak mencoba menenangkan gejala di PDIP, karena Ganjar akan dianggap tak bisa memberikan porsi besar kepada PDIP untuk terlibat di pemerintahan karena partai juga membutuhkan untuk bisa mengklaim hasil kerja pemerintah.

“Sosok Mahfud dianggap sosok yang terbaik dalam hal kinerja, memungkinkan juga sekaligus ia sebagai pengganggu rencana PDIP untuk menguasai pemerintahan. PDIP selama ini ingin bukan sekadar mengawal pemerintah, tetapi berusaha mendapatkan porsi juga atas kendali dari keputusan dan kebijakan pemerintah,” ujar Efriza.

“Mahfud layaknya akan menjadi rival Ganjar, langsung dan tidak langsung, terang-terangan atau secara tidak langsung, ia akan mewarnai kebijakan pemerintah dari usul, proses, hingga akhir. Diyakini Mahfud yang akan banyak mengeluarkan energi besar dari pemikiran, pembicaraan, hingga evaluasi penerapan,” sambung Efriza.

Efriza menyampaikan bahwa Mahfud adalah sosok yang cerdas, kukuh dalam pendiriannya, dan memiliki kualitas dalam mengelola pemerintahan.

“Meski begitu, sosok Mahfud ketika dianggap cawapres rasa capres, itu bukan karena kesadaran diri, maupun disengaja ingin menonjolkan dirinya, ingin merebut peran Ganjar sebagai Presiden, bukan, tapi itu terjadi secara alamiah karena Mahfud ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, panggilan dirinya sebagai seorang pekerja profesional. Hanya saja memungkinkan kelemahan Ganjar yang akan membuat Mahfud lebih mengi-

lap, sehingga dapat dianggap sebagai the real president oleh publik,” kata Efriza. ●RDO





“Bahwa hanya 42 persen daerah yang dipimpin oleh Pj Kepala Daerah yang telah melakukan sosialisasi netralitas, sementara 57 persen lainnya tidak melaksanakan sosialisasi tersebut”

Ip Ilham Firman

MENDAGRI COPOT PJ KEPALA DAERAH TIDAK NETRAL

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melakukan pergantian beberapa Penjabat (pj) Kepala Daerah yang dianggap tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tito menegaskan bahwa penggantian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan pendalaman informasi yang menunjukkan bahwa beberapa pj kepala daerah terbukti melanggar prinsip netralitas.

“Penggantian ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan-laporan mengenai perilaku tidak netral yang viral, baik dalam bentuk video maupun lainnya. Saya melakukan tindakan ini setelah melalui evaluasi dan analisis informasi yang ada,” ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito, indikasi ketidaknetralan pj kepala daerah ini didapatkan dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik dan peserta pemilu.

Kemendagri kemudian melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan keluhan tersebut, dan mengambil tindakan tegas dengan mencopot Pj Kepala Daerah yang terbukti tidak netral.

Salah satu contoh Pj Kepala Daerah yang diganti adalah Bupati Kampar, Provinsi Riau, Muhammad Firdaus.

Tito menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Bupati Kampar menunjukkan ketidaknetralan, sehingga keputusan penggantian diambil sebagai langkah tegas.

Sebelumnya, Kemendagri telah merilis rekapitulasi penilaian evaluasi terhadap 59 pj kepala daerah, di mana mereka mendapatkan rapor merah karena dinilai tidak memenuhi indikator dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Penjabat Kepala Daerah ini hanya mengumpulkan skor 0-59, masuk dalam kategori kurang netral.

Dalam rekapitulasi tersebut, terdapat pula lima Penjabat Kepala Daerah yang meraih rapor kuning dengan skor 60-79, sementara 48 Penjabat Kepala Daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan skor 80 hingga 100, atau kategori baik dalam menjaga netralitas.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, kembali menegaskan instruksinya kepada pj gubernur, walikota, dan bupati agar tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Tahun Politik.

Dalam arahnya, Tito menyoroti tiga aspek kunci dalam menjaga netralitas dan kestabilan selama periode menuju Kontesasi Politik 2024.

Pertama, Tito menjelaskan bahwa

penunjukan seorang Pj merupakan tugas dari pusat dengan tujuan menjalankan pemerintahan di daerah. Proses seleksi Pj melibatkan usulan dari DPRD, Kementerian Lembaga, yang kemudian diputuskan dalam sidang.

“Para Pj ini ditugaskan oleh pusat dengan tugas utama mengisi kekosongan dalam roda pemerintahan agar tidak terhenti, tentunya dengan batasan wewenang,” sambungnya.

Tito memberi peringatan agar mereka berhati-hati karena tugas ini juga memengaruhi kredibilitas pemerintah.

Kedua, Menteri Tito juga mengingatkan untuk mempercepat proses penyaluran dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024.

Dana ini akan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kep. Babel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tito menegaskan bahwa pencairan dana harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak penandatanganan NPHD, yang dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Ketiga, Menteri Tito menyoroti peran penting para Pj dalam menegakkan netralitas pegawai di daerah berdasarkan dasar hukum netralitas ASN, seperti UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan PP Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

Sementara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengajukan permintaan kepada pj kepala daerah agar mengawasi dengan optimal netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Asisten KASN, Ip Ilham Firman, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN belum berjalan secara optimal dan belum diikuti sepenuhnya oleh penjabat kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama

Kementerian/Lembaga tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu.

“Implementasi pembinaan netralitas ASN di daerah tidak berjalan dengan optimal dan masih ada penjabat kepala daerah yang belum mematuhi sesuai dengan Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KASN, dan Bawaslu,” ujar lip.

Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil survei pelaksanaan netralitas ASN di 101 daerah selama masa penjabat kepala daerah dari tanggal 22 Juli 2023 hingga 5 Desember 2023 yang dilakukan oleh KASN.

Melalui survei dengan metode destruktif kualitatif, ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sejumlah daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah belum optimal

dalam menegakkan aturan netralitas ASN sesuai Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KASN, dan Bawaslu.

“Bahwa hanya 42 persen daerah yang dipimpin oleh Pj Kepala Daerah yang telah melakukan sosialisasi netralitas, sementara 57 persen lainnya tidak melaksanakan sosialisasi tersebut,” ujar lip.

Fakta lain yang diungkap dalam survei adalah kurangnya penyusunan aturan netralitas oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa hanya enam daerah yang telah memiliki aturan netralitas bagi PPPK, sedangkan 94 persen daerah lainnya belum menyusun aturan tersebut.

“Survei juga menemukan bahwa 54 persen daerah memilih menyampaikan netralitas ASN melalui surat edaran,” tambah lip.

Berdasarkan data tersebut, KASN mengemukakan sejumlah rekomendasi, termasuk mendorong penjabat kepala daerah untuk segera menyusun regulasi netralitas bagi PPPK dan PPNPN (Tenaga Honorer) sebagai langkah aktivasi pengawasan internal.

Selain itu, optimalisasi pembinaan dan pengawasan netralitas ASN harus menjadi prioritas dalam kegiatan di bidang SDM Aparatur pada tahun 2024.

“Ip menekankan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terhadap kinerja seluruh Pj Kepala Daerah dalam mewujudkan Netralitas ASN di wilayah kerjanya,” pungkasnya. •IRY



“Para pemimpin, harus benar-benar waspada agar tidak ada kecurangan massif, karena jika hal tersebut terjadi dalam pemilihan presiden, kita bisa yakin itu akan memicu disintegrasi”

Abraham Samad



HAK PILIH RAKYAT TIDAK BOLEH DITEKAN

Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menyoroti pentingnya kedaulatan rakyat dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan ini dia sampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan III DPR di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/1/2024).

Puan menyampaikan bahwa Pemilu bukan sekadar pertarungan konstitusional untuk merebut kekuasaan negara oleh partai politik. Lebih dari itu, Pemilu merupakan hak bagi rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera.

“Pemilu tidak hanya sekadar kompetisi untuk merebut kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, melainkan juga hak rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera.” Ungkapannya

Puan menekankan bahwa Pemilu, bagi rakyat, merupakan kesempatan untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup mereka.

“Bagi rakyat, pemilu adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, Puan mengingatkan pentingnya menjamin bahwa rakyat, dalam menggunakan hak pilihnya, dapat melakukannya secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Puan menegaskan bahwa hak pilih rakyat tidak boleh dihalangi, ditekan, dimanipulasi, atau disalahgunakan dalam bentuk apapun.

Dia juga meminta semua lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, ASN, partai politik, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, untuk mematuhi komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Baginya, pemilu juga menjadi instrumen kunci dalam menerapkan prinsip check and balances dalam pengelolaan negara.

“Sistem ketatanegaraan dengan prinsip checks and balances merupakan implementasi dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu merupakan langkah untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. DPR RI, Pemerintah, dan KPU telah sepakat untuk melaksanakan tahapan pe-

nyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Tugas kita bersama adalah mengawal pelaksanaan pemilu,” seperti yang dikutip dari situs resmi DPR RI.

Puan menyoroti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 telah mengimplementasikan prinsip checks and balances pada setiap cabang kekuasaan negara.

DPR RI sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dia menekankan bahwa dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, UUD 1945 memberikan jaminan untuk menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara berkala guna mengimplementasikan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara.

Puan juga mengingatkan partai politik untuk lebih peka terhadap artikulasi kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, ia mengimbau partai politik untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa demi memperkuat persatuan bangsa.

Puan Maharani juga menyoroti fokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, bahwa DPR RI akan memberikan perhatian khusus terhadap tahapan Pemilu yang telah dimulai pada tahun 2023.

Puan menegaskan bahwa satu tujuan utama adalah menjaga persatuan rakyat, dengan mengutip pepatah, “Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya.”

Pentingnya menjalankan demokrasi dengan damai juga menjadi sorotan Puan. Ia mengimbau semua elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk

mengedepankan Pemilu yang aman, sebagai langkah untuk menghindari potensi perpecahan.

“Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Puan menyoroti perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah, sementara persatuan merupakan perjuangan bersama. Ia mengajak untuk menjaga dan merawat persatuan Indonesia.

Puan mengingatkan bahwa fondasi utama pembangunan negeri adalah persatuan rakyat, dan tanpa itu, kemajuan sulit dicapai.

Puan juga menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap setia pada nilai-nilai yang menyatukan kemajemukan bangsa, dengan menggunakan istilah “Ojo Pedhot Oyot,” yang berarti setia pada sumbernya.

Dalam konteks Pemilu, pesan ini bermakna agar tetap setia pada nilai-nilai yang menyatukan rakyat Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya, Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal Pemilu tahun 2024 untuk memastikan berlangsungnya secara demokratis, jujur, dan adil.

Sebagai bagian dari amanah konstitusi, DPR diharapkan melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

Puan menambahkan bahwa harapan rakyat adalah kehidupan yang semakin mudah, pening-

katan kesejahteraan, dan kemudahan dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya akan terus mendorong peningkatan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah, serta berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat untuk menciptakan lingkungan yang melindungi, mempermudah, dan mensejahterakan masyarakat.

“Harapan rakyat adalah kehidupan yang semakin mudah, peningkatan kesejahteraan, dan kemudahan dalam pelayanan publik,” pungkasnya.

Sementara, sejumlah pakar dan kritikus telah mengambil bagian dalam forum diskusi publik yang berjudul “Menyelamatkan Pemilu yang Demokratis”.

Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap potensi kemunduran demokrasi, mengingat tanda-tanda kecurangan pemilu telah muncul sejak tahap awal.

Mereka mengancam kemunduran demokrasi di Indonesia, yang dianggap mirip dengan masa sebelum orde baru.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan kekhawatiran terhadap potensi kecurangan yang bersifat massif, yang jika terjadi dalam pemilihan presiden, dapat memicu disintegrasi.

“Para pemimpin, menurut saya, harus benar-benar waspada agar tidak ada kecurangan massif, karena jika hal tersebut terjadi dalam pemilihan presiden, kita bisa yakin itu akan memicu disintegrasi,” ujar Abraham Samad.

Meskipun hanya sebagian kecil orang yang secara eksplisit menyebut bahwa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan segala sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan, hal ini menjadi perhatian serius.

Khawatirnya, hal ini dapat mengakibatkan pemilu yang tidak transparan dan adil.

Menurut pengamat, tanda-tanda kecurangan sudah terlihat sejak awal, terutama ketika Jokowi menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali. Indikasi tersebut kemudian berkembang pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.

Salah satu solusinya adalah dengan mengingatkan aparat untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik atau gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan. Upaya kolaboratif diharapkan dapat memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan, menghindari negara dari risiko kemunduran demokrasi. ●IRY





“Anies tidak bisa sendiri, masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas”

Dina Aryani

IKHTIAR MENUJU KEBAIKAN

Memiliki ikhtiar menuju kebaikan dan perubahan menjadi latar belakang Dina Aryani atau yang akrab disapa Dina Tanjung, maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palembang Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 9.

Padahal, sebelumnya bagi wanita kelahiran 31 Mei 1977 ini dunia politik adalah kotor sehingga dirinya tidak tertarik untuk menjadi politikus dan hanya akan tampil sebagai relawan.

Hingga pada akhirnya, Dina mendapatkan pencerahan dari berbagai pihak. Seperti para ulama, guru hingga para senior bahwa Indonesia memang perlu diisi orang-orang yang tepat membawa visi dan misi kebaikan.

“Sekali lagi saya tegaskan ini hanya pendapat pribadi saya, jangan lalu ada yang tersinggung. Karena pada saat itu, bagi saya politik itu kotor,” katanya, saat menjadi bintang tamu podcast Info Indonesia, belum lama ini.

Sebagai Presidium Manis (Emak-emak Anies) DPW Sumsel, ibu tiga anak ini tidak mendeklarasikan bahwa dirinya adalah sosok yang baik. Namun dengan visi dan misi perubahan maka tidak ada salahnya jika berjuang bersama.

“Saya tidak mengakui bahwa diri saya baik, tapi kami memiliki ikhtiar untuk menuju kebaikan,” sambungnya.

Apapun yang bisa dibuat, sambung dia, meskipun hanya sedikit tapi bermanfaat dan akan menjadi panjang menjadi sebuah kebaikan yang menggunung, maka layak untuk diperjuangkan. Sehingga harus ambil bagian.

“Kami membawa bendera PKS berbanding lurus dengan visi misi dan cita-cita Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maka apa yang kami akan berikan sebagai caleg PKS, sesuai dengan mandat PKS itu sendiri,” jelasnya.

Diakui wanita yang juga merupakan Kelompok Pemusik Jala-nan Palembang ini, ada banyak sekali hal-hal yang menjadi keresahan bagi emak-emak terhadap Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Keresahan emak-emak itu sendiri adalah PKS atau Pangan yang murah, Kerja ada atau lapangan pekerjaan tersedia dan Sehat yang terjangkau.

“Tiga pilar ini menjadi keresahan bagi emak-emak, mulai dari Pangan, Kerja dan Sehat atau (PKS),” ungkap dia.

Lalu, pada saat tiga pilar tersebut bisa diperbaiki maka Indonesia bisa

menuju perubahan sesuai dengan tagline Anies Baswedan dan Cak Imin. Hanya saja, Anies dan Cak Imin atau AMIN tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh masyarakat yang satu tujuan dengan dirinya.

“Karena orang cerdas pasti memilih orang yang cerdas pula, artinya jika Anies bisa membuat tiga pilar ini berubah menjadi lebih baik, adil dan merata untuk semua, maka keresahan emak-emak akan terjawab, karena batas kenyamanan emak-emak itu ya hanya itu pada tiga pilar tersebut,” ulasnya.

Disebutkan Dina, dalam beberapa tahun terakhir bisa dilihat, di 10 tahun terakhir apa yang dapat dirasakan, maka dari itu, Anies dan Cak Imin dengan tagline perubahan untuk Indonesia.

“Anies tidak bisa sendiri, masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas,” tegasnya.

Manis sendiri merupakan salah satu sayap juang dari Anis (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera) dan relawan Anis ini sudah tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel. Tidak hanya itu, hingga saat ini Manis sudah mendeklarasikan ada di 9 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk di Palembang sendiri sudah ada di 17 Kecamatan.

Jumlah Manis mencapai 1.300 hingga 1.500 orang yang merupakan mendukung dan bergabung untuk mengambil peranan Indonesia berubah.

“Memang harus turun ke jalan, ada teman-teman yang belum

tahu target dan cita-cita Anies, tugas Manis blusukan ke berbagai daerah yang bisa dijangkau, rumah ke rumah, majelis taklim untuk mengkampanyekan prestasi Anies,” bebernya.

Pasalnya, berjamaah itu lebih indah, apalagi demi kebaikan. Tentu saja yang menjadi nilai jual adalah perubahan, ide, gagasan, adil dan merata.

Anies Baswedan sendiri mengajarkan untuk tidak fokus pada keburukan, tidak fokus kepada hal-hal yang membuat semangat juang turun, fokus pada hal-hal yang baik.

“Karena kita adalah agen yang akan membawa virus-virus kebaikan kepada masyarakat sekitar,” katanya.

Sementara untuk pilihan sendiri, Dina tidak memaksakan karena kembali menjadi hak konstitusi masing-masing individu. Sebagai kader koalisi, memiliki kewajiban menyampaikan visi dan misi Anies dan Cak Imin.

“Anies bisa mewujudkan visi dan misinya, karena keyakinan memegang peranan penting Aminkan aja dulu poin dalam visi dan misi AMIN yang menjadi doa,” jelasnya.

Dalam Ijtima ulama sudah menyampaikan bahwa dukungan kepada AMIN, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan Islam, maka Ijti-

ma ulama itu adalah panduan.

“Kesempurnaan hanya milik Allah SWT tapi manusia wajib ikhtiar untuk mencapai kesempurnaan itu,” sambungnya.

Anies sosok yang sempurna, kecerdasan emosional, kecerdasan keimanan, kecerdasan intelektual dirangkul dengan teknik public speaking yang sangat luar biasa serta dengan latar belakang akademisi hebat, tidak bisa dicari cela, meskipun tidak ada manusia yang sempurna.

Sedangkan untuk pertarungan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, diakui Dina sangat sengit. Tapi bagi yang melihat adalah hati dan otak yang “Waras”, sebenarnya kesengitan itu

hanya dirasakan oleh pihak rival.

“Kalau tim 01 dan Anies Baswedan dan Cak Imin nya sendiri anteng saja, karena benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan ide dan gagasan dan terukur,” ulasnya.

Bahwa seorang Anies baswedan, sudah melewati tolak ukur yang sudah dipikirkan, bukan karbitan, sebenarnya memang pertarungan yang sengit tapi Anies Baswedan yakin akan menang.

Anies Baswedan sering kali disebut hanya bisa omong saja atau omon-omon, salah satu hal yang nyata dilihat pemilih adalah calon pemimpin yang pintar bicara, berkosa kata baik, kosa kata banyak dan mengerti apa saja yang di sampaikan, hal itu tergambar dari seorang Anies Baswedan.

“Jika ada statement bahwa Anies Baswedan hanya bisa omon-omon seperti satu kalimat yang menggambarkan keresahan pihak rival. Seorang Anies tidak hanya bisa bicara saja, kalau pintar bicara ya betul dan hal itu diakui, bahkan oleh dunia, public speaking hebat. Apa yang disampaikan terukur dan nyata adanya, tidak sesuai jika statement omon-omon disematkan kepada Anies Baswedan,” jelasnya.

Bahkan, tingkat kepuasan warga DKI Jakarta saat Anies Baswedan menjadi Gubernur mencapai 80 persen, artinya 5 tahun kebersamaan dengan warga DKI hingga mengalami perubahan saat ini, yang mengakui tingkat dunia.

“Statement omon-omon itu tidak berlaku untuk seorang Anies Baswedan,” tegasnya.

Dengan tagline AMIN yakni perubahan, selagi Anies dan pendukungnya memiliki keyakinan yang sama dan kuat hingga terukur, maka Anies dan Cak Imin ini mampu membawa masyarakat Indonesia untuk perubahan Indonesia yang memang berubah adil dan merata untuk semua.

“Kami meyakini itu, kami tidak takut akan hal itu, kita hanya takut kepada Allah SWT,” pungkasnya. ● IRY



“Kalau banyak orang yang meragukan kapasitas habib di Indonesia, silahkan tidak masalah karena tanggung jawab kami adalah menjaga akhlak Nabi Muhammad dan keturunannya”

Habib Gasim Alkaf



PEMENANGNYA SUDAH DIATUR PILPRES HANYA SEREMONIAL

Meski diikuti tiga pasangan calon namun pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2024 ini dinilai berjalan tidak sesuai jalurnya yang selayaknya berada di lintasan jujur, dan adil (Jurdil). Sehingga diakhir pesta demokrasi pemilihan presiden hanyalah sebuah seremonial yang diketahui pemenangnya sejak awal.

Walaupun terlihat lebih demokrasi dari periode sebelumnya namun Pilpres 2024 ini merupakan sandiwara politik yang sudah diatur siapa pemenangnya. Sehingga pelaksanaan demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia hanyalah sebuah gimmick politik saja.

Bahkan aturan kemenangan dalam kompetisi Pilpres 2024 sudah ditentukan baik itu akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Pilpres 2024 seharusnya jadi sebuah pesta demokrasi rakyat yang riang gembira namun faktanya sudah dikuasai oleh kekuasaan yang telah menentukan hasilnya.

“Itu keyakinan saya sebetulnya. Semua instrumen Pilpres 2024 yang sudah disusun bisa satu atau dua putaran, pemenangnya sudah ditentukan. Pilpres sebetulnya jadi pesta demokrasi semua rakyat harus gembira. Tetapi kita lihat satu fenomena ada instrumen yang menguasai semua aspek untuk selalu memimpin dan berkuasanya,” kata Habib Gasim Alkaf.

Fenomena demokrasi licik yang mengedepankan kekuasaan daripada kejujuran menjadi kegusaran bagi Habib Gasim. Sehingga meski dia saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif namun sekarang bukan menjadi fokus utamanya lagi tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar bagaimana dampak buruk bila salah memilih pemimpin nanti.

“Bahkan rakyat Indonesia sekarang ini tengah menonton ketidakadilan dari sebuah demokrasi yang seharusnya berjalan dengan ditentukan hasil dari pilihan rakyat bukan lewat kekuasaan,” ujarnya..

Habib Gasim mengungkapkan Pilpres 2024 ini sudah tidak mencerminkan Pemilu jurdil apa lagi terlalu sulit untuk adanya perubahan karena instrumen dikuasai oleh penguasa.

Dia menyatakan pemilih hanya bersifat seremonial semua tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Karena pemimpin yang diinginkan rakyat telah dipilih dan ditentukan sebelum berdasarkan instrumen yang telah disusun rapi.

“Pemilu hanya seremonial sangat tidak yakin berjalan Jurdil,” tegasnya.

Kondisi itu dijelaskannya karena terjadi semua orang yang memiliki niat baik dan akhlak tidak dilibatkan. Bahkan semuanya disingkirkan tidak dilibatkan dalam pemerintahan yang bisa aman-ah

mengurus rakyat Indonesia.

“Lihat saja orang-orang yang memiliki ilmu akhlak yang baik semuanya disingkirkan. Orang-orang baik dikeluarkan dari sistem dan dimasukkan penjara. Orang buruk diangkat dan dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan,” keluhnya.

Power dengan kekuatan uang digunakan di sistem Indonesia mirisnya rakyat juga menginginkannya dan menerimanya. Semua itu jadi tidak bisa mengubah sistem karena secara tidak langsung telah terbentuk secara sendiri.

“Buktinya di negeri ini rakyat masih bisa dibayar berarti masyarakat yang menginginkannya,” tuturnya.

Namun dia menyebutkan tidak hanya rakyat kaum yang memiliki ilmu agama m u m - puni juga banyak tarik oleh kekuasaan uang. Bahkan sampai mau terlibat dalam sistem yang salah dari kekuasaan yang telah menguasai sistem pemerintahan.

“B u k a n hanya rakyat biasa ustad juga bisa beralih sesuatu yang tidak baik. Dikasih uang mau. Banyak ulama mau karena dikasih uang agar pesantren miliknya dibangun. Misalnya ulama yang ikut ke paslon ini karena ingin pesantren dibangun mendukung paslon

nomor urut 01, nomor urut 02 dan nomor urut 03. Siapa ulama yang mau dibayar dan tidak! Kalau ulama mata duitan mendukung jelas tidak benar,” ungkapnya.

Kondisi Indonesia hari ini dinilai mirip seperti penguasa di masa kepemimpinan Fir'aun yang hanya dilihat oleh Allah SWT. Karena sebenarnya Allah SWT bisa saja melenyapkan ketidakadilan di Indonesia namun tetap dibiarkan agar menjadi pelajaran dan ujian untuk orang-orang yang beriman.

“Cerita ini seperti Fir'aun yang malahan berkuasa 400 tahun! Apakah Allah SWT tidak bisa menjatuhkannya bisa tapi ujian kepada orang yang beriman. Mungkin Allah SWT memberikan Istdraj bukan juga memberikan ridho-nya. Istdraj diberikan untuk melihat bagaimana orang beriman diberikan cobaan. Walaupun negara kita seperti ini mau bagaimana lagi kita harus terima saja,” pungkasnya.

Ditegaskan Gasim, meski mencalonkan sebagai Caleg namun sekarang dia tidak fokus lagi ke arah tersebut. Hal yang terpenting baginya sekarang bagaimana membangun kesadaran untuk memilih pemimpin yang diridhai Allah.

Dimana dari tiga pilihan itu sudah diperlihatkan sebetulnya siapa pemimpin yang layak memimpin bangsa ini. Cerdas, pintar, berakhlak, tidak emosional, punya tutur kata yang santun serta berkepribadian baik. Semua diperlihatkan.

Sebaliknya juga diperlihatkan dengan jelas sosok pemimpin yang emosional, haus kekuasaan serta menggunakan segala cara untuk menang.

“Kalau saya dengan tegas sosok pemimpin 01 adalah orang yang tepat memimpin bangsa ini namun kita akan sulit menang. Pilpres kita sekarang yang ngatur manusia jadi sudah tahu siapa yang menang tapi ingat kalau Allah sudah berkehendak. Siapapun tidak bisa mengubah ketentuannya,” ujar Habib.

Sebagai seorang yang punya garis keturunan nabi, Habib Gasim mengaku punya beban moral untuk bisa menjaga akhlak orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan mereka sesama habib sendiri suka berbeda pandangan, termasuk dalam Pilpres ini.

“Kalau banyak orang yang meragukan kapasitas habib di Indonesia, silahkan tidak masalah karena tanggung jawab kami adalah menjaga akhlak Nabi Muhammad dan keturunannya. Apakah akhlak keluarga nabi baik semua yah tentu tidak. Mungkin ada juga mereka itu pemabuk atau lainnya namun bagi kami status habib itu punya tanggung jawab untuk menjunjung moral nabi dan keturunannya. Termasuk dalam berpolitik,” ujarnya. ●RDR





“Inshaallah beliau akan hadir di tempat-tempat yang memang rakyat menunggu”

Puan Maharani

INFO
PARTAI

Minggu III • Januari 2024

13

MEGAWATI TURUN GUNUNG MENANGKAN GANJAR-MAHFUD

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, siap turun langsung ke akar rumput saat Kampanye Akbar atau Rapat Umum pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Mega akan turun dalam rangka memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Nanti kita jadwalkan. Inshaallah beliau akan hadir di tempat-tempat yang memang rakyat menunggu,” ujar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024.

Puan menyebut pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari KPU perihal jadwal termasuk zonasi kampanye terbuka nanti.

“Inshaallah semua yang nanti akan dijadwalkan bersama dengan KPU itu merupakan kesepakatan bersama yang memang sudah ditetapkan dan inshaallah kampanye akbar itu akan berjalan dengan baik, lancar, tertib dan semuanya. Semua pihak, termasuk menghargai dan menghormati posisinya masing-masing,” kata Puan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai pilihan strategi kampanye terbuka sambil menunggu KPU mengumumkan aturannya ke publik.

“Kami sudah menyiapkan berbagai opsi-opsi kampanye dari Bu Mega, Pak Ganjar, Prof Mahfud MD, Pak Mardiono, Pak HT, Pak Andika, dan Pak Sandiaga Uno. Menteri-menteri yang berasal dari PDIP ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Bu Risma, Mas Pramono Anung,” jelas Hasto.

“Semuanya kami siapkan dengan plotting untuk melakukan kampanye, turun ke bawah bersama rakyat dalam melakukan pembagian zonasi di antara jajaran pimpinan nasional dan kader-kader dari TPN Ganjar-Mahfud,” sambungnya.

Hasto menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan dengan baik sambil menunggu keputusan resmi dari KPU terkait dengan pembagian zonasi kampanye akbar.

“Kami akan mulai terutama sesuai dengan zonasinya. Misalnya kami dapat Sumatera, kami mulai dari Sumut. Lalu kalau dapat di Jawa, kami akan mulai dari Jateng. Sehingga, daerah-daerah yang menjadi basis

PDIP itu akan jadi fokus kampanye akbar, dan kemudian 18 provinsi yang Pemilu 2019 dimenangkan oleh PDIP juga menjadi fokus konsentrasi dari PDIP,” tegas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan benar. Di mana seharusnya pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Jadi tidak digiring loh. Tolong ya,” kata Megawati di acara HUT ke-51 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Megawati kemudian membandingkan ketika zaman Orde Baru, KPU bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang menurutnya lebih kuat.

“Waktu reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi saya selalu di-bully, komisi sifatnya adhoc kan, sewaktu-waktu bisa dibubarkan,” kata Mega.

Megawati juga memwanti-wanti agar rakyat jangan sampai tergiur hanya dengan melihat sosok calon presiden di Pilpres 2024. Namun, hal yang perlu dilihat adalah pikiran dan hatinya yang harus menjadi satu.

“Cermati rekam jejaknya, moral etika, tanggung jawabnya, memahami rakyat,” kata Megawati.

Dalam keseluruhan syarat-syarat menjadi pemimpin, kata Megawati, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura yakin Ganjar

Pranowo dan Mahfud MD lah yang memenuhi syarat tersebut.

“Mereka kesatuan dwitunggal, tidak ada negara maju yang pemimpinnya tanpa memperjuangkan hukum, manunggal dengan rakyat,” ujar Megawati.

Megawati mengatakan, kalau ada pemimpin yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak melindungi rakyat, pasti guncang. “Rules of the game adalah partai yang memilih calonnya. Saya selalu lihat-lihat yang bagus, sampai saya kontemplasi, bicara sama bapak saya. Lihat, lihat, lihat, terus harus ada keputusan. Bukannya asal oh kamu saja jadi pemimpin,” ujarnya.

Megawati juga meyakini Ganjar-Mahfud akan menang satu putaran di pilpres 2024. “Jadi inshaallah kita akan menang satu putaran,” ujar Megawati.

Dia menyebut pihaknya memperjuangkan kebenaran, dan kebenaran ia yakin akan menang.

“Orang

yang bijaksana, apa? Kebenaran itu suci di atas segalanya. Coba bayangkan kalau kita bohong, itu bohong dari kita sendiri loh,” kata Megawati.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi rencana Megawati Soekarnoputri yang bakal turun gunung saat kampanye akbar Pemilu 2024 dengan menyebut bahwa ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju sejak awal selalu turun langsung bertemu masyarakat dan mendampingi kegiatan kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sudah di daratan terus, enggak di gunung,” kata Airlangga.

Beberapa ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju rutin mendampingi kegiatan kampanye Prabowo Subianto dalam beberapa pekan terakhir. Dalam rangkaian kampanye Prabowo di Sumatera pekan lalu misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendampingi kegiatan kampanye Prabowo di Bandar Lampung, kemudian Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mendampingi Prabowo berkampanye di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga beberapa kali mendampingi kegiatan kampanye Prabowo, antara lain di Blitar, Jawa Timur dan di Aceh. Di Aceh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga mendampingi kegiatan Prabowo berkampanye dan bertemu masyarakat.

Airlangga, yang saat ini juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga bersama Prabowo berkampanye sekaligus konsolidasi kemenangan pemilu Partai Golkar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pekan pertama Januari 2024. Prabowo dan Airlangga saat itu masak nasi goreng bersama-sama disaksikan para kader Golkar.

•RDO



"Saya kira konsistensi PSI untuk menunjukkan bahwa dia partai anak muda, dia partai yang sejak awal punya komitmen untuk memberantas korupsi, itu kemudian kita ragukan"

Lucius Karus



RAGUKAN PSI BERANTAS KORUPSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya melakukan pembaruan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari yang semula pengeluarannya tercatat sebesar Rp180 ribu menjadi Rp24 miliar.

Dalam rilis terbaru yang dikeluarkan KPU, Minggu, 14 Januari 2024, partai yang diketuai Kaesang Pangarep tersebut telah memperbarui jumlah pengeluarannya pada LADK. Angka pengeluaran PSI hingga 12 Januari 2024 pukul 21.35 WIB tercatat sebesar Rp24.130.721.406. Sementara penerimaannya mencapai Rp33.055.522.406.

Adapun rincian total penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut berasal dari 580 calon anggota legislatif Partai PSI di seluruh Indonesia yang disampaikan kepada KPU melalui laman Sisdak.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan, partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada KPU sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

"Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1/2024) dan tunggu saja pengumuman dari KPU," kata Raja Juli.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, mengatakan laporan pengeluaran dana kampanye PSI yang dilansir KPU, prosesnya belum final.

"Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan, kami input bila sudah melakukan pembayaran dan kami terima bukti kuitansinya," kata Grace dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Grace mengatakan total pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LP-PDK) pada akhir masa kampanye.

"Sekali lagi, laporan belum final, kami masih melakukan pendataan. Data yang ada di

KPU adalah dokumen yang belum selesai dan masih akan terus berkembang," lanjut Grace.

Dia menegaskan PSI akan melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye sesuai aturan yang berlaku. Masih ada waktu perbaikan dan penyempurnaan oleh KPU.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, sebelumnya juga mengatakan pengeluaran LADK PSI yang hanya Rp180.000 harus dilakukan pengecekan. "Ya itu harus dicek kenapa yang bersangkutan demikian," kata Bagja.

Menurut Bagja, terkadang partai politik menyerahkan laporan seadanya dan baru melakukan perbaikan belakangan. Hal itu, katanya, menjadi persoalan proforma di kalangan partai politik.

"Kadang-kadang orang untuk mematuhi proforma itu dimasukkan dulu, perbaikannya belakangan. Itu juga jadi persoalan," ujar Bagja.

Bagja mengatakan LADK partai politik, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus terus diperbarui. Terlebih, nantinya akan ada LPPDK.

"Harus di-update terus, kan ada LPPDK nanti. Di situ akan dilihat update-nya," ucap Bagja.

Dia mengatakan tidak logis jika nantinya pengeluaran dana kampanye partai politik masih di angka Rp180 ribu, sementara kampanye dilakukan di banyak tempat. "Kan enggak rasional kalau masih tetap Rp180 ribu. Loh ini ke mana?"

Mereka k a m - p a - n y e

di mana-mana, kok enggak ada laporannya? Itu kan tidak logis dan tidak rasional," imbuh Bagja.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut tak ada partai politik yang jujur ihwal laporan dana kampanye. Hal ini disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus merespons berubahnya laporan dana kampanye PSI, yang semula hanya Rp180.000 menjadi Rp24 miliar.

"Saya pikir tidak akan ada partai yang jujur, untuk menyampaikan berapa sesungguhnya dana kampanye yang mereka gunakan sampai akhir nanti," ujar Lucius di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Lucius memahami perubahan laporan perubahan dana kampanye yang sudah dikeluarkan PSI. Menurutnya, perubahan ini karena laporan dana kampanye saat ini masih tahap awal. Dengan kata lain belum final.

Ia menduga bahwa parpol pada umumnya juga belum memberikan informasi secara pasti mengenai berapa dana kampanye yang sudah mereka keluarkan.

"Saya kira bukan cuma PSI, hampir semua partai belum memberitahukan angka pasti terkait dengan berapa dana kampanye yang sudah mereka habiskan dari awal masa kampanye sampai dengan sekarang," ujarnya.

Di sisi lain, Lucius menyoroti peran penyelenggara pemilu yang tidak punya itikad untuk memberikan perhatian terhadap akuntabilitas penggunaan dana kampanye parpol. Menurutnya,

parpol menjadi tak punya tanggung jawab untuk transparan ketika pihak penyelenggara pemilu menganggap akuntabilitas tidak dianggap penting.

"Jadi, kalau tidak ada yang kemudian merasa berkepentingan memeriksa itu, ngapain partai-partai ini jujur, karena aslinya mereka (penyelenggara pemilu) juga tidak jujur," tegas dia.

Lucius pun meragukan komitmen PSI terhadap pemberantasan korupsi. "Saya kira konsistensi PSI untuk menunjukkan bahwa dia partai anak muda, dia partai yang sejak awal punya komitmen untuk memberantas korupsi, itu kemudian kita ragukan," ujar Lucius.

Menurutnya, PSI sebagai partai politik ternyata tidak jujur terhadap pelaporan dana kampanye mereka. "Ketika untuk urusan dana kampanye dia tidak bisa mampu meyakinkan kita bahwa dia bisa akuntabel terkait dengan dana yang dikelolanya termasuk dengan dana kampanye," ujar Lucius.

Pengamat Politik, Dedi Kurnia Syah, mengatakan, sistem keuangan dari PSI sangat buruk. Hal itu membuat tidak ada yang percaya dengan laporan keuangan PSI.

"Rasional karena mereka tidak menghitung dana kampanye yang dikeluarkan oleh donatur, elit, atau sumbangan lain yang tidak tercatat atau diakui oleh partai, artinya sistem keuangan di PSI sangat buruk. Itulah sebab, tidak akan ada yang percaya dengan laporan PSI soal dana kampanye itu," kata Dedi, Kamis, 11 Januari 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menambahkan, PSI mengira publik dapat dibodohi dan dibohongi soal transparansi dana kampanye tersebut.

"Mereka sedang mengira jika publik atau siapapun yang berkepentingan atas dana kampanye sebagai orang-orang bodoh yang bisa dibohongi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menilai mungkin saja benar PSI hanya mengeluarkan dana Rp180 ribu dan itu masuk akal.

"Mungkin saja benar PSI secara kepartaian mengeluarkan dana kampanye Rp180 ribu, dan itu masuk akal," pungkasnya. ● RDO





“Dalam konstelasi politik tahun 2024, Edy Natar yang sebelumnya dianggap hanya sebagai ‘pasangan’ dari Syamsuar, akan menghadapi kesulitan jika memutuskan untuk maju dalam Pilgubri”

Aidil Haris

EDY NATAR NASUTION MULAI TEBAR GAGASAN

Meski masih ada beberapa waktu lagi, kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau menjadi topik hangat di kalangan Masyarakat.

Pilgub Riau dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024, sebanyak 548 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, akan menggelar pemilihan tersebut.

Salah satu figur yang menarik perhatian adalah Edy Natar Nasution, yang sebelumnya lama menjalani tugas kemiliteran di luar Riau dan kemudian “pulang kampung.”

Edy pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1984.

Karirnya di militer mencapai puncak ketika pria kelahiran Bengkalis, 29 Mei 1961 itu menjabat sebagai Danrem 031/Wirabima.

Lalu pada 2018, Edy mencoba peruntungan di dunia politik. Ia maju sebagai calon Wakil Gubernur Riau mendampingi Syamsuar sebagai calon Gubernur Riau pada kontestasi Pilgubri.

Pulangannya Edy Natar ke Riau telah menjadi fokus perbincangan, dengan beberapa media menyoroti kebahagiaannya dalam judul artikel seperti “Edy Natar Pulang Riau Senang.”

Namun, terlihatnya bahwa narasi politik sukses ini mungkin tidak akan diulang. Kabarinya, kedua tokoh ini akan maju secara terpisah dalam Pilkada 2024.

Edy Natar telah secara resmi menyatakan niat politiknya untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

“Insya Allah, saya maju,” ujarnya saat berinteraksi dengan Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) belum lama ini.

Pernyataan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh Riau, mahasiswa, ulama, dan masyarakat umum.

Edy menyatakan bahwa dalam pandangannya, seorang gubernur berperan sebagai perpanjangan

tangan dari Pemerintah Pusat, bertindak sebagai mata dan telinga pusat di tingkat daerah.

“Gubernur dianggap sebagai perpanjangan tangan pusat, berfungsi sebagai mata dan telinga pusat untuk daerah-daerah. Tugas utama Gubernur Riau adalah menjalin hubungan dengan 12 kabupaten/kota di wilayahnya. Jika pemerintah kabupaten/kota atau provinsi menghadapi kendala, tugas gubernur adalah membawa permasalahan tersebut kepada pusat untuk meminta bantuan,” ungkapnya.

Edy lebih lanjut menjelaskan konsep pembangunan Provinsi Riau yang diprakarsainya, dimulai dengan fokus pada sektor pertanian.

“Selanjutnya, kita perbaiki kualitas layanan kesehatan dan tanggapilah keluhan masyarakat terkait masalah seperti banjir dan lainnya. Prioritasnya adalah memastikan kecukupan pangan,

kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan mental,” terangnya.

Selanjutnya, Edy menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur guna meningkatkan mobilitas antardaerah. Infrastruktur ini juga diharapkan mampu merangsang sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industri wisata.

“Kami berkeinginan agar setiap kabupaten/kota di Riau dapat mencapai tingkat kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua daerah dapat mandiri dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal masing-masing,” tandasnya.

Edy juga terbukti sebagai pemimpin berkualitas selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, bekerja sama dengan Syamsuar untuk membangun dan mengembangkan Riau. Pencapaian mereka mencakup peningkatan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.

Aspek keagamaan dan moralitas juga menjadi poin penting dalam penilaian seorang pemimpin. Edy Natar Nasution dikenal sebagai sosok yang agamis dengan integritas tinggi.

Kepemimpinannya yang transparan, adil, dan bertanggung jawab tercermin dalam gerakan dakwah GSSB (Gerakan Solat Subuh Berjamaah), yang telah menjadi populer dengan lebih dari 162 kali pelaksanaan dalam tiga tahun terakhir.

Dalam konteks GSSB, Edy menekankan pentingnya kesetiaan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Gerakan ini bukan hanya sebagai kewajiban beribadah, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan bekal di akhirat.

“Melalui kesetiaan kepada sang pencipta, GSSB dapat semakin diterima oleh masyarakat dan membawa kesadaran akan pentingnya pengabdian kepada Tuhan,” sambungnya.

Edy Natar Nasution diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Riau jika terpilih sebagai Gubernur. Dengan latar belakang yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, ia dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi provinsi tersebut.

Edy Natar Nasution telah mencuri perhatian dalam arena politik Riau. Kemenangannya sebagai wakil gubernur Riau pada Pilkada 2018 telah membuktikan popularitasnya dan kemampuannya dalam memimpin. Selama masa jabatannya, Edy telah

berhasil menghadirkan perubahan positif di berbagai sektor di Riau.

Salah satu daya tarik utama Edy Natar Nasution adalah kemampuannya berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial di Riau. Ia menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan selalu berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan sosial.

Edy Natar Nasution juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan dan visi untuk masa depan Riau. Ia terus berupaya untuk mendorong kemajuan daerahnya serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Riau. Prestasinya yang signifikan membuatnya dihormati dan diakui sebagai tokoh penting di Riau.

Edy Natar Nasution merupakan contoh inspiratif dari seorang politisi yang berpengaruh dan berhasil dalam mengembangkan daerahnya.

Melalui dedikasi tingginya, Edy terus berkontribusi untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Ia layak dijadikan teladan bagi generasi muda untuk berjuang dengan semangat dan integritas di dunia politik.

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, DR Aidil Haris menyatakan, bahwa Edy Natar mungkin akan menghadapi kesulitan jika memutuskan untuk maju dalam Pilgu Riau untuk periode kedua.

Menurut Aidil, peluang kemenangan Edy Natar dalam Pilgubri kedua terlihat tipis, terutama jika dihadapkan pada persaingan politik dan ditentukan oleh pasangannya.

Aidil berpendapat bahwa peluang kemenangan Edy Natar menjadi gubernur menjadi agak sulit, terutama jika dibandingkan dengan kemungkinan majunya sebagai calon anggota DPR RI.

“Dalam konstelasi politik tahun 2024, Edy Natar yang sebelumnya dianggap hanya sebagai ‘pasangan’ dari Syamsuar, akan menghadapi kesulitan jika memutuskan untuk maju dalam Pilgubri,” katanya

Ia menyoroti perbedaan situasi dengan Syamsuar, yang memiliki dukungan suara yang lebih besar.

Penting juga dicatat oleh Aidil bahwa jika Syamsuar juga ikut serta dalam Pilgubri, akan terjadi pembagian suara di antara mereka.

“Situasi ini menjadi semakin rumit karena basis suara Edy Natar tidak sebesar basis suara yang dimilikioleh Syamsuar,” katanya.

Aidil Haris juga mengemukakan pertimbangan terkait fokus Edy Natar pada daerah asalnya, Rohul. Menurutnya, memuaskan perhatian hanya pada daerah asal mungkin tidak akan memberikan dorongan yang cukup untuk mendukung kandidasi Edy Natar dalam Pilgubri.

Sebaliknya, Aidil menyarankan agar Edy Natar lebih baik memusatkan perhatian pada pencalonan sebagai anggota DPR RI. **RI • IRY**



“Peluang terpilih lebih besar tentu di Jawa Barat karena bagaimanapun dia sebagai petahana, dan hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya masih tetap tertinggi dan unggul”

Firman Manan



PELUANG BESAR RIDWAN KAMIL MENANG DI JABAR

Setelah menghadapi persimpangan antara Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) atau DKI Jakarta, kini Ridwan Kamil resmi ditunjuk oleh Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, belum lama ini.

Tidak hanya Ridwan Kamil, Partai Golkar juga menugaskan beberapa kader terbaiknya untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai cagub.

Antara lain, Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, Bobby Nasution sebagai Cagub Sumatera Utara, dan Khofifah Indar Parawansa yang kembali maju sebagai Cagub Jawa Timur.

Keputusan ini telah menimbulkan antusiasme masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat.

Hingga saat ini, elektabilitas Ridwan Kamil masih tinggi dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Jaringan Survei Pemuda Pelajar dan Ragaplasma Research, dengan mendapatkan dukungan sebanyak 25,2 persen.

Di posisi kedua, Dedi Mulyadi mengantongi suara sebanyak 16,7 persen. Sehingga, Dedi Mulyadi semakin dianggap sebagai saingan yang serius bagi Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2024.

Ridwan Kamil telah menyatakan bahwa keputusannya maju sebagai petahana dalam Pilgub Jabar 2024 memiliki alasan yang sederhana, yakni karena lebih realistis. Menurutnya, peluang untuk terpilih lebih besar di Jabar dibandingkan di DKI Jakarta.

“Saya mendapatkan dua surat penugasan dari DPP Golkar, satu untuk Jawa Barat dan dua untuk DKI. Jadi, suratnya dua,” ungkap Ridwan Kamil.

Emil menekankan bahwa kedua surat penugasan dari DPP Golkar tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari partai, yang harus menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja maksimal.

“Kepercayaan itu akan saya terjemahkan ke dalam kerja-kerja politik setelah menerima arahan dari partai,” tambahnya.

Meskipun fokusnya tertuju pada Pilgub Jabar, Emil menyatakan bahwa ia tidak

menutup kemungkinan untuk mencoba peruntungan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkannya sambil terus memantau perkembangan dinamika politik ke depan.

“Meskipun diberikan dua, prioritas tetap di Jawa Barat, namun diminta untuk tetap mencoba berkiprah sesuai dengan penugasan di DKI Jakarta,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah menunjukkan arahnya kepada Emil untuk maju dalam Pilgub Jabar. Hal ini juga diperjelas oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara, dalam keterangan yang diberikannya baru-baru ini.

Selain Emil, istrinya Atalia Praratya Kamil dan Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Sanjaya, juga diberikan tugas untuk bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung.

Sementara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung, Golkar menugaskan dua nama, yaitu Wakil Bupati Bandung saat ini, Syahrul Gunawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto.

Selain tugas tersebut,

Kang Emil juga didapuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menegaskan janjinya dan menyatakan baktinya kepada Prabowo.

“Niat

kuat untuk memenangkan Pak Prabowo. Semua semangat dan kompak, memakai warna biru langit yang jadi simbol kemenangan kita. Kita yakin akan menjadi pemenang di 2024,” ucap Kang Emil.

Ridwan Kamil mengungkapkan, dengan kekompakan yang terjalin kuat, TKD Jabar akan membentuk sebuah super team untuk memastikan Prabowo bisa menang Pilpres 2024 satu putaran.

Bahkan TKD menargetkan perolehan suara Prabowo-Gibran bisa mencapai 60%.

“Kita harus menang satu putaran, kita harus tempur habis-habisan. Target kita minimal 60 persen insya Allah lebih, kalau ini terjadi Jabar sebagai penentu, ditambah tempat lain, insya Allah satu putaran bisa direalisasikan,” tegas mantan Gubernur Jabar ini.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan menekankan bahwa peluang terbesar bagi Ridwan Kamil (Kang Emil) untuk memenangkan Pilgub Jabar jelas terdapat di Jabar.

“Peluang terpilih lebih besar tentu di Jawa Barat karena bagaimanapun dia

sebagai petahana, dan hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya masih tetap tertinggi dan unggul dibanding-

kan dengan kandidat lain,” ujar Firman Manan.

“Walaupun namanya disebut-sebut di Jakarta dan memiliki peluang, di sana persaingannya relatif lebih ketat. Sebetulnya,” tambahnya.

Firman menjelaskan bahwa Golkar memberikan tugas kepada Kang Emil untuk mempertegas peran yang sebelumnya telah diemban olehnya. Tugas tersebut adalah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jabar.

“Rekomendasi ini sekaligus penegasan dari partai terkait dengan upaya yang harus dilakukan Kang Emil untuk memenangkan Pilpres dan Pileg di Jawa Barat. Sebagai ketua TKD, peran Kang Emil sangat penting,” ungkapnya.

Firman menyoroti bahwa kemenangan terakhir Golkar di Jabar terjadi pada tahun 2004, dan kehadiran Kang Emil diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Meski tidak mudah, Golkar berharap bisa menjadi pemenang di Jawa Barat.

“Tugas ini sebenarnya juga merupakan ujian bagi Kang Emil untuk meningkatkan dukungan Golkar. Ini menjadi ujian apakah Kang Emil berhasil sebagai ketua TKD di Jawa Barat dan mampu meningkatkan suara Golkar secara signifikan dalam Pileg,” tegas Firman.

Lebih lanjut, Firman menyatakan bahwa Golkar juga memiliki tujuan lain dengan menugaskan Kang Emil maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Partai ini sedang menjajaki seberapa besar dukungan yang bisa mereka dapatkan di ibu kota, meskipun kondisi persaingan di Jakarta masih relatif ketat.

“Namun, situasinya agak berbeda di Jakarta karena kompetisinya masih ketat dan belum ada satu pun kandidat yang unggul. Jadi, menurut saya, ini masih dalam tahap eksplorasi,” jelasnya. ● IRY





“Mengenai koalisi, kami sangat terbuka, dan kami memberikan kebebasan kepada Bapak Hidayat Arsani untuk menjajaknya”

Bambang Patijaya

HIDAYAT ARSANI MAKIN PEDE JADI KANDIDAT TAK TERGOYAHKAN

Ada beberapa calon muali muncul ke permukaan, meramaikan kontastasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung termasuk mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.

Hidayat Arsani telah mengumumkan niatnya untuk mengikuti Pilgub di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mendatang.

“2024 kita akan maju, kita amar ma’ruf nahi munkar,” kata pria yang akrab disapa Panglima Hidayat Arsani.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, Panglima Hidayat Arsani menegaskan, tidak ada riwayat dirinya maju sebagai calon wakil gubernur.

“Nomor satu tentunya! Tidak ada riwayat saya maju sebagai calon wakil gubernur,” tegas Hidayat Arsani.

Panglima, panggilan akrab Hidayat Arsani, mengungkapkan bahwa ia telah memiliki enam nama kandidat calon wakilnya untuk Pilgub tersebut. Meskipun identitas enam calon tersebut masih dirahasiakan olehnya.

Selain berkomunikasi dengan calon wakilnya, Hidayat juga aktif menjalin hubungan dengan sejumlah partai politik.

“Komunikasi dan penajakan terus dilakukan, sejauh ini sudah ada enam nama calon yang sudah dikantongi, cuma masih kita rahasiakan. Kalau komunikasi sudah ke empat Parpol,” ujar Hidayat.

Hidayat menyoroti potensi keterlibatan mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, dalam Pilgub 2024.

Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada figur yang dapat menandingi elektabilitas Erzaldi Rosman, kecuali dirinya sendiri.

Namun, Hidayat memberikan catatan bahwa jika ada figur lain yang setara dengan Erzaldi, ia tidak akan maju sebagai kandidat, melainkan kembali fokus pada perannya sebagai pengusaha dan petani.

Sebagai informasi, Hidayat Arsani baru-baru ini meraih gelar Doctor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), sebuah perguruan tinggi internasional yang berkantor pusat di Singapura dan Malaysia.

Hidayat Arsani, yang dikenal sebagai tokoh politik dan ekonomi di Bangka Belitung, menjadi

satu-satunya wisudawan yang dianugerahi gelar tersebut pada upacara wisuda tersebut.

UIPM memberikan penghargaan ini atas kontribusinya dalam pembangunan, ekonomi, dan sosial.

Dalam tanggapannya terkait penugrahan gelar, Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukurnya dan berharap pencapaiannya selama ini dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Bangka Belitung.

Hidayat Arsani memiliki catatan sukses dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan, perhotelan, dan kesehatan, serta pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung.

Hidayat Arsani menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sejak 12 Mei 2014 hingga 12 Mei 2017. Ia merupakan pengusaha dengan beragam kepentingan bisnis di bawah bendera Arsani Group.

Nama Hidayat Arsani terkenal karena a d i -

akui komitmennya terhadap daerah dan masyarakatnya. Tak heran jika ia menerima penghargaan Maha Karya Pembangunan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 yang diberikan oleh Gubernur Eko Maulana Ali sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap daerah tersebut.

Hidayat Arsani berperan besar dalam membangun Bangka Belitung, berkontribusi di berbagai sektor seperti pabrik, perkebunan, hotel, plaza, dan rumah sakit.

Saat ini, Hidayat Arsani ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Petani Tambak Nusantara Indonesia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Geliat nama Hidayat Arsani tetap tidak tergoyahkan sebagai kandidat calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar Bangka Belitung.

Sebagai kader murni internal partai Golkar, Hidayat Arsani menjadi satu-satunya pilihan yang dianggap siap untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung tahun 2024 mendatang.

Berdasarkan penilaian, Hidayat Arsani dianggap sebagai satu-satunya kader Golkar yang memiliki kesiapan untuk menghadapi kontestasi Pilgub di masa mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung, Bambang Patijaya menjelaskan

kan bahwa dalam Pilgub 2024, pihaknya memberikan prioritas pada pengusungan kader internal partai, yakni Hidayat Arsani.

“Dalam kontestasi Pilgub mendatang, kita akan memberikan prioritas kepada kader internal partai Golkar, yaitu Bapak Hidayat Arsani,” ujar Bambang Patijaya.

Bambang Patijaya menyatakan bahwa partainya tetap terbuka terhadap Partai Politik (Parpol) lain yang berminat untuk berkoalisi dalam Pilgub 2024 mendatang.

Terkait dengan penentuan pasangan calon, DPD Partai Golkar Bangka Belitung sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.

“Mengenai koalisi, kami sangat terbuka, dan kami memberikan kebebasan kepada Bapak Hidayat Arsani untuk menjajaknya,” tambah BPJ.

Dalam penggambaran DPD Partai Golkar Bangka Belitung terhadap Pilgub 2024, Hidayat Arsani telah diposisikan di kursi nomor satu.

“Hidayat Arsani akan diposisikan sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung untuk Pilgub 2024 nanti,” sambungnya.

Posisi ini dianggap sebagai harga mati bagi partai dan menjadi fokus utama dalam persiapan kontestasi politik mendatang.

Bambang Patijaya menegaskan komitmen partainya untuk mendukung Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur, dan bahkan membuka diri terhadap kemungkinan berkomunikasi dan menjajaki kerjasama dengan partai lain terkait wacana tersebut.

“Komitmen partai untuk mendukung Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur, dan bahkan membuka diri terhadap kemungkinan berkomunikasi dan menjajaki kerjasama dengan partai lain terkait wacana tersebut,” jelasnya.

Termasuk dalam hal penentuan pasangan calon yang akan mendampingi Hidayat Arsani, BPJ menyatakan keterbukaan partainya terhadap segala kemungkinan, baik dari segi warna partai maupun kolaborasi politik.

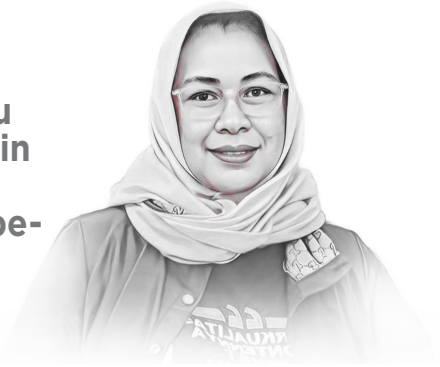
“Kami membuka segala kemungkinan untuk calon pendamping Hidayat Arsani, baik dari segi warna partai maupun kolaborasi politik,” pungkasnya.

●IRY



“Perempuan berhak untuk berpolitik, bekerja kantoran, jadi pengusaha atau terjun ke pemerintahan dan profesi lain yang setara dengan laki-laki. Jangan sampai terjadi pelanggaran untuk kebebasan hak-hak kaum perempuan”

Nila Ertina



PERAN PENDAMPING JADI KUNCI KEUNTUNGAN DI PILPRES 2024

Para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden terus bergerak dan bersosialisasi agar bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya para calon, orang-orang terdekat mereka seperti istri, anak dan kerabat lainnya ikut bergerak untuk mencari simpati.

Kehadiran seorang pendamping atau istri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para kandidat untuk memperluas jangkauan kunjungan mereka. Sehingga tak heran, sosok seorang istri sama sibuknya dengan sang suami untuk ikut berkampanye.

Bagi para simpatisan dan kader di daerah, sosok istri Capres dan Cawapres sama pentingnya dengan para kandidat karena kehadiran mereka juga bisa meningkatkan moral para kader di daerah.

Caleg DPRD Sumsel Partai PPP Khali-sah Hayatuddin menyebutkan peran pendamping menjadi kunci keuntungan di Pilpres 2024 karena ikut membantu membagi wilayah untuk menghimpun suara dari rakyat Indonesia secara merata. Terlebih lagi blusukan harus dilakukan dengan cara bertemu langsung rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke.

“Indonesia sangat luas kalau para istri calon presiden dan wakil presiden ikut berkampanye sangat membantu sekali tentunya. Pendampingan juga menjadi kunci keberhasilan kampanye kalau melakukan sendiri tentunya sulit untuk mendapatkan wilayah lebih banyak sosialisasi,” kata dia.

Menurutnya istri para paslon pastinya memilih nilai hampir sama seperti para paslon tersebut. Jadinya sangat efektif untuk rakyat terpukau dan tersentuh karena melihat secara langsung istri para tokoh politik nasional yang berkompetisi di Pilpres 2024. Dengan efektifitas itu sangat menguntungkan pada suami melibatkan istrinya turut berkampanye.

“Intinya kalau menurut saya penting banget peran pendamping itu, kalau ada paslon yang tidak melakukan tentunya mengalami kerugian sekali. Contohnya seperti Prabowo Subianto tentunya mengalami kerugian dibandingkan paslon lainnya,” jelasnya..

Dia menyebutkan semua istri paslon seperti nomor urut 01 Anies Baswedan dan Cak Imin, nomor urut 02 wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ikut turun berkampanye. Kesemua itu dinilai sangat positif dan baik jadi tidak boleh ada oknum

melakukan bullying atau hinaan.

Mereka akan jadi ibu negara jadi para calon ibu negara baik presiden dan wakil presiden harus aktif berpolitik. Tentunya tujuannya agar kedepannya tahu apa kerja suami dan juga bisa membantu program pemerintah.

“Dengan mengetahui langsung nasib rakyat dibawah para istri juga bisa kembali mengingatkan suami kalau mereka ada janji saat kampanye. Mereka juga bisa tahu penderitaan rakyat kecil saat jadi ibu negara harus ikut aktif juga membantu rakyat namanya juga seorang ibu negara,” paparnya.

Dilanjutkannya ibu negara juga memiliki peran penting dalam pemerintahan tidak hanya nantinya menjadi pendamping suami dalam pekerjaan. Ibu negara juga bisa turun langsung untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Pendamping turun ke lapangan untuk blusukan itu bukan hanya kampanye semata mereka adalah calon ibu negara jadi juga harus tahu keadaan rakyat secara langsung,” ucapnya.

Sementara itu dia menilai dari semua istri paslon dia sangat terpukau kepada istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti dengan kinerja mendukung sang suami.

Atikoh dinilai lebih konsisten karena benar-benar berkelompok Indonesia dan berbagi wilayah dengan suaminya Ganjar Pranowo.

“Apa lagi saya mendengar statement Atikoh saat ke Palembang berkata disini mereka berjuang untuk suami saya masa saya hanya tidur di rumah. Kata-kata itu saya ingat menunjukkan kepeduliannya kepada sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Dia juga benar-benar keliling Indonesia,” ucapnya.

Penilaian secara pribadi menyebutkan Atikoh calon ibu negara yang ideal untuk Indonesia karena berbagai faktor pendukung yang sangat kuat. Atikoh dinilai memiliki wawasan luas, cerdas, peduli dan tampilan sederhana serta bersahaja.

“Tidak seperti istri pejabat dia seperti rakyat biasa sederhana. Dia juga pintar jadi tahu apa yang harus dilakukan apabila menjadi ibu negara. Secara pribadi saya menilai Atikoh cocok menjadi ibu negara kita,” pungkasnya.

Sementara aktivis Perempuan Palembang, Nila Ertina menyatakan, perempuan itu memiliki hak yang sama untuk berpolitik seperti laki-laki jadi tidak salah kalau istri para paslon Pilpres berpolitik.

Baginya Kesetaraan gender harus dikedepankan perempuan jangan sampai terus menjadi kaum marginal. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua

orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.

“Perempuan berhak untuk berpolitik, bekerja kantoran, jadi pengusaha atau terjun ke pemerintahan dan profesi lain yang setara dengan laki-laki. Jangan sampai terjadi pelanggaran untuk kebebasan hak-hak kaum perempuan,” tegasnya.

Menurutnya untuk calon ibu negara aktif menjadi pendamping suami di Pilpres 2024 sah-sah saja asal niatnya benar-benar bersih. Pahalanya kepentingan berpolitik harus sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia.

“Boleh kalau niatnya benar-benar bersih untuk kepentingan rakyat Indonesia apabila nanti terpilih jadi tahu kondisi real rakyat. Namun kalau hanya cari perhatian untuk memancing suara setelah jadi tidak mau turun lagi dan memikirkan rakyat itu yang salah,” tuturnya.

Dilanjutkannya sosok ibu negara sangat penting untuk bangsa dan negara, jadi benar-benar harus konsisten dalam menjalankan tugas. Ibu negara tidak hanya sekedar status sosial di mana publik.

“Istri pejabat saja mulai dari istri gubernur dan walikota harus melakukan pelatihan khusus bagaimana mereka bisa mengurus rakyatnya. Bukan hanya bisa ikut dalam jamu-jamuan saja tetapi juga mengurus rakyatnya,” tuturnya.

Dia menyebutkan tugas ibu negara yang terpenting itu adalah mengawal hak-hak kaum hawa karena sering disia-siakan seakan berada di negara kedua di Indonesia.

“Ibu negara juga sebaiknya bisa mengawal kesejahteraan kaum perempuan karena siapa lagi yang akan memikirkan perempuan kalau bukan ibu negara. Banyak persoalan hukum kasus pelecehan seksual semakin tinggi, gizi buruk anak stunting dan sebagainya. Semua itu harus menjadi perhatian negara perempuan adalah juga melahirkan generasi terbaik untuk bangsa Indonesia,” pungkasnya. ●RDR





“Door to door lebih efektif di akhir-akhir pemilu pada tanggal 14 Februari nanti”

Yudha Renaldi

INFO
DAPI

Minggu III • Januari 2024

19

MEMAKSIMALKAN KEKUATAN BLUSUKAN

Pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung 14 Februari nanti sudah semakin dekat. Semua partai pendukung yang terlibat di pencalonan ini juga semakin sibuk karena harus menjalankan misi ganda mereka yakni memenangkan calon presiden yang mereka usung sekaligus menyukseskan tujuan utama mereka yakni lolos di pemilihan legislatif (Pileg).

Untuk menjalankan dua misi tersebut para kader bekerja ekstra keras agar tujuan mereka tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memaksimalkan kekuatan dan daya pikat dengan blusukan turun ke jalan bertemu masyarakat.

Dibandingkan mengumbar alat peraga kampanye ternyata bertemu dan blusukan menjadi salah satu cara efektif untuk mendulang dukungan suara.

Ketua DPW PKS Sumsel Muhammad Toha Oni menyebutkan di waktu yang tinggal satu bulan lagi Timnas AMIN fokus melakukan giat door to door dengan melakukan blusukan menyasar lokasi ke akar rumput. Baginya melakukan gerakan bertemu langsung dengan masyarakat lebih efektif di detik-detik pemilihan nantinya.

“Kita sekarang mengurangi mencetak alat kampanye seperti banner spanduk dan baliho. Kami lebih memfokuskan menemui masyarakat secara langsung melakukan sosialisasi untuk memilih pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Cak Imin,” kata dia.

Hal itu juga dampak dari efektivitasnya hasil debat Pilpres beberapa waktu lalu berdampak positif meningkatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin.

Dia menilai di akar rumput semua banyak mendukung AMIN apalagi performa saat debat dua kali calon presiden dan satu kali calon wakil presiden.

“Debat Pilpres membantu antusiasme masyarakat untuk lebih terlibat dalam Pilpres tahun ini dibandingkan tahun lalu. Alhamdulillah AMIN mendapatkan tempat di hati

masyarakat Sumsel. Karena saat kita melakukan sosialisasi mereka mendukung AMIN karena hasil debat keduanya sangat luar biasa,” tuturnya.

Dia menyebutkan Anies Baswedan memberi pemaparan dari semua pertanyaan di debat sangat akurat. Dari sana masyarakat sangat senang kepada sosok Anies Baswedan untuk memimpin bangsa Indonesia kedepannya.

“Pak Anies Baswedan tampil luar biasa di debat dia bisa menjelaskan lebih detail dibandingkan calon presiden lainnya. Dari semua masalah atau pertanyaan itu dia selalu memberikan solusi dari semua masalah tersebut,” jelasnya.

Dilanjutkannya untuk target Timnas AMIN tetap optimis 70 persen dan menang di putaran pertama. Kondisi inilah membuat mereka bersama mesin politik lainnya lebih memaksimalkan sosialisasi ke setiap wilayah di Sumsel sesuai instruksi pusat.

Bahkan PKS secara mandiri setiap pekan menggelar flashmob serentak di seluruh Sumsel. Flashmob sendiri aksi memperkenalkan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Cak Imin dengan pu-

luhan orang berbaris di jalan raya membawa spanduk, banner dan baliho.

“Di Palembang itu ada 6 titik kita lakukan secara serentak setiap dapil, setiap hari minggu dimulai pukul 06.30 WIB sampai selesai. Flashmob ini dari kami PKS untuk memperkenalkan AMIN sekaligus menjadi solusi kurangnya alat kampanye. Jadi kita tidak menempelkan alat kampanye di jalan-jalan, namun menggunakan orang untuk berdiri disepanjang jalan di Palembang ini juga dilakukan serentak se Sumsel,” pungkasnya.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel Yudha Rinaldi juga mengatakan hal yang sama pihaknya fokus melakukan blusukan dengan cara door to door menjumpai masyarakat khususnya calon pemilih yang belum menentukan pilihan.

Terlebih lagi kunjungan istri calon presiden Ganjar Pranowo Siti Atiqoh Supriyanti blusukan ke Palembang dan wilayah Sumsel sejalan dengan sosialisasi dilakukan pihaknya.

“Kunjungan Ibu Atiqoh seiring sejalan dengan program-program kita disini untuk sosialisasi Pilpres. Ibu Atiqoh langsung bertemu dengan simpatisan dan masyarakat di Palembang dan Sumsel semua berjalan lancar sesuai program,” tuturnya.

Menurutnya door to door lebih akurat di-

lakukan di detik-detik terakhir karena masyarakat lebih suka diajak bertemu dan tukar pikiran untuk menentukan pilihan mereka. Partai PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Ganjar Pranowo harus lebih maksimal berkunjung menemui semua masyarakat di Sumsel.

“Door to door lebih efektif di akhir-akhir pemilu pada tanggal 14 Februari nanti,” jelasnya.

Dia pun mengklaim performa Ganjar Pranowo lebih mentereng dibandingkan calon presiden lainnya. Bahkan Ganjar Pranowo dinilainya menang di dua kali debat Pilpres diyakinkan menambah pasokan dukungan kepada pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Contohnya debat sangat berpengaruh sekali saat kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat mereka menyebutkan Ganjar Pranowo tegas dan lugas. Bahkan Ganjar Pranowo juga cocok menjadi pemimpin karena tidak gampang emosional dibandingkan calon lainnya,” terangnya.

Soal target PDI Perjuangan bersama koalisi lainnya Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumsel tidak mau jumawa untuk memenangkan kompetisi hanya satu putaran.

Yudha Rinaldi menilai kekuatan paslon dan pada tim pemenangan adalah sama, baik itu dalam skala Sumsel atau Indonesia. Sehingga sulit rasanya untuk menang dalam satu putaran dan kemungkinan akan berjalan dalam dua putaran.

“Untuk target berat karena kita menilai kekuatan baik di Sumsel atau nasional itu berimbang. Jadi kami tidak mematok kemenangan di putaran pertama sebab akan ada putaran kedua. Makanya semua koalisi tidak mau ngotot untuk menang. Bukan berarti kami pesimis lebih kepada realistis makanya target dua putaran,” tuturnya. ●RDR



“Saat ini kami masih mengawasi kondisi logistik yang saat ini dikerjakan KPU. Dari hasil pengawasan kami ada beberapa yang mengalami masalah. Selanjutnya kita koordinasi dengan KPU untuk ditindaklanjuti”

Kurniawan



DALAM KONDISI AMAN MESKI ADA RIAK KECIL

Kegiatan kampanye Pemilu 2024 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan legislatif di Sumatera Selatan masih berlangsung aman. Ada beberapa laporan yang telah diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait ketidakpuasan pelaksanaan kampanye di beberapa tempat namun secara umum masih berlangsung aman dan terkendali.

Belum ada ‘kerja berat’ yang dirasakan Bawaslu Sumsel hingga saat ini. Beberapa laporan yang telah masuk pun kini telah selesai dan diserahkan ke penegak hukum terpadu (Gakkumdu) untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami masih mengawasi kondisi logistik yang saat ini dikerjakan KPU. Dari hasil pengawasan kami ada beberapa yang mengalami masalah. Selanjutnya kita koordinasi dengan KPU untuk ditindaklanjuti,” terang Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan.

Beberapa masalah yang ditemui terkait logistik Pemilu ini antara lain ditemukannya kertas suara robek, ada sebagian yang buram, penulisan dengan tinta meluber serta ada kertas suara yang nyasar.

“Surat suara yang nyasar itu yakni lembaran DPD Bengkulu nyasar ke KPUD Musi Rawas. Ada surat suara Kabupaten Muara Enim nyasar ke KPUD Kabupaten OKU. Makanya kita meminta KPU untuk melakukan sortir surat suara untuk melihat ada kerusakan atau tidak. Kemudian baru dilipat,” terang Kurniawan.

Selain itu Bawaslu juga menerima beberapa laporan pengaduan terkait pemasangan atribut alat peraga dan netralitas. Untuk netralitas, Bawaslu menerima laporan adanya keterlibatan kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir. Sementara untuk

atribut Alat Peraga Kampanye (APK), masih banyak yang menyalahi aturan.

Bawaslu Sumsel masih banyak menemukan pemasangan APK yang menyalahi aturan yakni dipasang di jalan protokol, tempat ibadah dan beberapa tempat terlarang lainnya. Untuk penertiban ini mereka melibatkan langsung beberapa pihak terkait mulai dari Polisi Pamong Praja, KPU daerah serta partai politik peserta Pemilu 2024.

“Untuk kepala desa sudah kita serahkan ke Gakkumdu dan saat ini sudah mengarah ke proses pidana Pemilu namun sanksi hukumnya masih proses. Untuk APK yang menyalahi aturan, kita sudah lakukan penertiban,” jelas mantan anggota KPU Kota Palembang ini.

Disisi lain mereka juga menerima keberatan dari peserta diantaranya pengaduan tim sukses Capres 02 yang keberatan APK mereka ditertibkan Bawaslu Lahat karena dianggap tidak menyalahi aturan.

“Untuk masalah itu sudah kita tindaklanjuti dan sudah mendapat laporan dari Bawaslu Lahat. Dari hasil laporan, Bawaslu Lahat sudah menjalankan tugasnya dengan melibatkan Pol PP, KPUD serta pihak partai politik juga. Seperti sudah diatur sebelumnya, APK tidak boleh dipasang di jalan protokol dan untuk penertibannya secara administrasi sudah kita penuhi semua,” jelas Kurniawan.

Kemudian untuk laporan pelanggaran APK

salah satu calon anggota legislatif di wilayah Kota Palembang juga sudah ditindaklanjuti Bawaslu setempat.

Meski ada riak kecil lanjutnya, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 di Sumatera Selatan berlangsung aman dan hingga kini belum ada temuan pelanggaran kampanye. Bawaslu sendiri secara rutin melakukan himbauan kepada tim pemenangan paslon, partai politik untuk sama-sama menjaga ketertiban selama kampanye.

Sementara untuk netralitas hingga kini berjalan sangat baik. Baik ASN, TNI dan Polri hingga kini masih terjaga kenetralitasannya. Bahkan untuk menjaga netralitas ini terus berlangsung Bawaslu secara rutin memberikan informasi kepada Pj Gubernur Sumsel termasuk soal netralitas.

“Hingga saat ini baik ASN, TNI dan Polri masih terjaga karena sudah secara tegas melalui deklarasi bahwa mereka akan bersikap netral. Alhamdulillah kondisinya masih terus kondusif,” ujarnya.

Rekrut Pengawas TPS

Kondisi yang sama diungkapkan anggota Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang. Selain fokus pada pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu di daerah juga kini sedang menyiapkan anggota pengawas Pemilu yang saat ini masih dalam proses

seleksi.

“Saat ini kita melakukan pengawasan melekat, mulai dari tahapan kampanye Pemilu, kedatangan logistik hingga proses sortir lipat surat suara” ujar Khairil yang menjabat sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data (SDMOD) Bawaslu Palembang.

Sejauh ini Bawaslu kota Palembang telah menerima beberapa laporan terkait pelanggaran yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Ada beberapa laporan pelanggaran yang bersifat administratif.

“Untuk saat ini, ada dua laporan yang sudah diregistrasi namun ada banyak laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materilnya,” jelasnya.

Selain sibuk dalam pengawasan logistik, Bawaslu juga sedang melakukan seleksi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana antusiasme masyarakat sangat tinggi, melebihi kuota kebutuhan. Dimana berdasarkan data ada 4.777 pengawas TPS yang dibutuhkan sementara peminatnya mencapai 5.562 pendaftar.

Khairil Anwar Simatupang juga mengatakan, untuk tahapan seleksi Pengawas TPS sudah memasuki tahapan wawancara sampai pada tanggal 17 Januari nanti. Tercatat ada 3.057 laki-laki dan 2.505 perempuan yang mengikuti seleksi.

“Ini sudah melebihi target kuota karena pendaftar perempuan melebihi 30 persen, dan ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Kota Palembang untuk menjadi Pengawas TPS,” terangnya.

Untuk tahapan wawancara yang dilaksanakan di Sekretariat Panwaslu kecamatan masing-masing. Bawaslu Kota Palembang memastikan seleksi ini akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Bawaslu RI.

“Kami berharap pengawas TPS yang terpilih nanti akan bekerja dengan penuh dengan integritas, karena PTPS adalah garda terdepan sebagai Pengawas Pemilu yang akan mengawal proses di lapangan secara langsung. Sikap netral harus dijaga penuh demi terwujudnya pemilu

2024 yang damai dan betul-betul harus profesional,” harap Khairil.
●RDR



“Kami sangat bahagia kedatangan beliau ke Palembang. Lihat semuanya bahagia dan sangat mencintai calon ibu negara Indonesia”

Yahya Maya Sakti

TIDAK ADA GANJAR, ATIQOH JUGA TAK APA

Padatnya jadwal kunjungan daerah untuk melakukan kampanye membuat Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atiqoh Supriyanti berbagi wilayah untuk blusukan. Mengantikan posisi sang suami Atiqoh melakukan kunjungan kampanye ke Kota Palembang dan beberapa wilayah Sumatera Selatan.

Dengan niatan mencari suara menggantikan suaminya Ganjar Pranowo untuk kampanye sebagai calon presiden berpasangan dengan Mahfud MD nomor urut 3 di Pilpres, Atiqoh menyapa warga Sumatera Selatan dengan mengunjungi beberapa pusat keramaian di Kota Palembang dan beberapa wilayah lainnya.

Sambutan istri mantan Gubernur Jawa Tengah ini cukup meriah dan mendapat sambutan yang cukup antusias.

Kunjungan pertamanya adalah mendatangi posko Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo - Mahfud MD Provinsi Sumsel yang ada di Jalan Tengku Umar Palembang Kamis, (11/1/2024) pukul 21.00 WIB.

Dengan menggunakan baju kaos hitam bertuliskan tas tes dan hijab pink terlihat sederhana serta merakyat.

Performa Siti Atiqoh Supriyanti hari itu menuai banyak pujian warga karena penampilan yang sederhana. Terlebih lagi tutur kata serta bahasa tubuhnya terlihat ramah dan kerap menebarkan senyum membuat warga tidak segan melakukan dialog dengan beliau.

Bahkan dia juga tidak sengaja bernyanyi sedikit menggoyangkan bahunya menikmati lagu dari seniman Palembang yang mempersembahkan lagu menyambut kedatangannya ke Bumi Sriwijaya.

Saat berbicara Siti Atiqoh secara spontan mencurahkan isi hati kepada simpatisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Posko TPD, dia disinggung aktivitasnya mengelilingi Indonesia.

Tentunya aktivitas politiknya melakukan kunjungan menggantikan suami dengan cara berbagi wilayah untuk kampanye di seluruh Indonesia, Atiqoh mengaku mendapatkan cibiran dan hinaan.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyebutnya oknum melakukan bisa anggap saja para netizen dengan komentar yang sangat menyayat hati untuknya. Kata netizen Ibu Atiqoh belum resmi jadi ibu negara saja sudah keliling Indonesia, kemana-mana terlihat terlalu ambis sekali.



“Ibu dan Bapak ada yang tidak kenal dengan mas Ganjar saja semangat sekali memberikan dukungan masa istrinya ngadem di kamar saja ya Bu! Istrinya nonton drakor atau belanja itu bukan kita banget ya Bu,” kata dia menjawab cibiran netizen yang menyindir.

Tetapi dia tidak mau mendengar semua nyinyiran netizen dan komentar negatif dengan tetap terus melakukan perjalanan untuk aktifitas kampanyenya di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai calon ibu negara dia harus fokus mendukung suaminya untuk kepentingan rakyat luas di Indonesia.

“Dari pada mendengarkan orang-orang nyinyir. Saya lihat wajah Ibu dan Bapak menambahkan energi untuk berjuang. Saya turun ke lapangan juga agar bisa mengerti keluhan, tangisan dan perjuangan masyarakat secara langsung,” ucapnya lagi

Berkunjung ke Posko TPD Ganjar - Mahfud Sumsel, Atiqoh memberikan edukasi kepada para 52 simpatisan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bagaimana cara melakukan sosialisasi kepada calon pemilih lainnya.

Dia menyebutkan para simpatisan bisa mempengaruhi masyarakat dengan cara menjelaskan program suaminya.

“Target kita terutama kepada masyarakat yang sampai sekarang belum memiliki pilihan. Bagaimana mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihan tentunya dengan program-program,” terangnya.

Ada 21 program unggulan yang ditawarkan Ganjar - Mahfud untuk Indonesia yang bisa diakses dan dilihat langsung masyarakat. Program-program ini juga akan bisa tersampaikan dengan baik bila cara penyampaiannya juga benar.

“Kalau 21 program itu kita ucapkan se-

mua masyarakat akan mabok mendengarnya. Caranya, kita bisa melihat karakteristik masyarakat yang didekati. Misalnya saya banyak mendapatkan laporan soal dana bansos tidak tersalurkan secara merata dan tidak tepat sasaran. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyalurkan bansos tepat sasaran dengan cara meningkatkan dana Bansos agar lebih maksimal dan merata,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti menjadi salah satu program andalan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Wakil Mahfud MD. Ini akan memudahkan masyarakat ke depan, baik untuk mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan hingga usaha.

“KTP Sakti semuanya akan terealisasi disana baik Bansos, pendidikan dan kesehatan. Program-program untuk kesejahteraan rakyat harus disosialisasikan agar masyarakat tahu siapa yang layak dipilih,” ucapnya kepada semua relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di TPD Sumsel.

Dia menyebut semua program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat berdasarkan kepada kepentingan masyarakat.

Menurut cucu dari KH Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Riyadlus Sholihin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga ini, dia sangat senang melihat antusiasme masyarakat Sumsel.

“Untuk relawan di Sumsel tetap semangat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD satu putaran. Kesan saya di Palembang makanannya enak, orangnya ramah-ramah. Adik saya itu istrinya orang Komering mukanya juga sangat Palembang sekali. Jadi kesini seperti mudik ke tempat saudara sendiri,” kesannya.

Ketua TPD Ganjar Pranowo - Mahfud MD Sumsel Yahya Maya Sakti menyebutkan, ia sangat senang sekali Siti Atiqoh Supriyanti bisa berkunjung ke Posko TPD Sumsel.

Dia menilai semua pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga sangat mencintai sosok Siti Atiqoh Supriyanti.

“Kami sangat bahagia kedatangan beliau ke Palembang. Lihat semuanya bahagia dan sangat mencintai calon ibu negara Indonesia,” kata dia.

Dia tidak segan-segan menyebutkannya Atiqoh Pranowo bisa dikatakan satu-satunya calon ibu negara yang mendukung suaminya sampai terjun langsung ke seluruh wilayah di Indonesia.

Bahkan Atiqoh Pranowo calon ibu negara yang paling cerdas dan pintar dibandingkan calon ibu negara lainnya.

“Lihat saya calon ibu negara kita sangat cerdas dan sangat cocok menjadi pendamping calon pemimpin Indonesia. Benar kata pepatah di belakang sosok calon pemimpin pastinya ada istri yang luar biasa seperti ibu Atiqoh Pranowo,” pungkasnya.●RDR

“Pemilu seperti tanpa aturan, pengawasan, dan penegakan hukum karena pelanggaran tersebut terjadi di mana-mana”

Titi Anggraini



BAWASLU HARUS TEGAS AWASI APK LANGGAR ATURAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan memeriksa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang secara serampangan dan melanggar aturan. Hal itu juga terkait viralnya video di media sosial Instagram yang memperlihatkan warga menuliskan sejumlah caleg jadi “tersangka penusukan pohon” di pinggir jalan di Jakarta.

Salah satu video beredar pada Jumat, 12 Januari 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, belum memastikan soal sanksi kepada calon legislatif atau calon presiden yang alat peraga terpasang di tempat terlarang. “Kalau begitu kami akan periksa,” ujar Bagja di gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Namun dia juga menyebutkan soal baliho yang diberi cat warna itu bisa termasuk pengrusakan alat peraga. “Kan merusak alat peraga, tapi nanti ada pertanyaan khususnya, alat peraganya kan dipasang tidak pada tempatnya. Nah, itu jadi persoalan kan, ada tabrakan hukum di situ,” ujar dia.

Bagja mengatakan, Bawaslu akan menelusuri lagi sejumlah tempat yang menjadi tempat pemasangan APK yang melanggar aturan tersebut. “Kan pas dipilox kan tidak kelihatan, tuh. Videonya kan sebar,” ucap dia.

Bagja mengatakan larangan pemasangan alat peraga kampanye di pohon atau dipaku pada pohon. Menurut dia peraturan itu sudah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Dalam PKPU itu tidak boleh menempel (pohon) atau dipaku. Dulu kan kesepakatannya tidak boleh dipaku itu. Nah kemudian sekarang dilarang,” kata Bagja.

Dia menyatakan penurunan APK itu merupakan kewenangan KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK.

“Kalau dilarang maka penurunannya oleh KPU seharusnya,” tutur dia.

Menurut dia, aturannya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, ada kewenangan Bawaslu untuk

penurunan APK yang pemasangannya melanggar aturan. Pencabutan APK bermasalah itu akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah setempat.

Di sisi lain, Bawaslu Jakarta Pusat bakal merekomendasikan sanksi administratif untuk menertibkan APK yang mengotori fasilitas umum. “Kami bakal merekomendasikan sanksi administrasi melalui KPU kepada caleg atau partai bersangkutan. Tapi, kami coba audiensi dulu dengan Kasatpol PP, pihak timses atau caleg bersangkutan,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, Kamis, 11 Januari 2024.

Sonny memastikan, pemasangan APK di fasilitas umum, termasuk di jembatan penyeberangan orang (JPO), melanggar peraturan. “Kalau di Jakpus, melalui SK Bawaslu Jakarta Pusat Nomor 725, itu termasuk dilarang,” ujar Sonny.

Dalam waktu dekat, Bawaslu bakal mengadakan audiensi dengan Satpol PP serta perwakilan partai dan caleg untuk membahas pelanggaran tersebut.

“Kami akan solusikan hal tersebut dengan Bawaslu Provinsi. Kemungkinan kami mengadakan audiensi atau bertemu dengan Kasatpol PP DKI. Mereka menunggu instruksi lanjut dari Satpol PP DKI,” jelas Sonny.

Sebagai informasi, atribut kampanye terlihat memenuhi fasilitas umum, mulai dari JPO Pasar Senen, JPO akses Halte Kramat Sentiong, hingga JPO akses Halte Salemba UI, Jakarta Pusat. Atribut kampanye seperti baliho caleg, spanduk, bendera partai, hingga pamflet terlihat “merusak” pemandangan jalan.

Sebagian besar atribut kampanye itu memasang nama dan wajah para caleg DPRD DKI dapil 1

Jakarta Pusat dan caleg DPR RI dapil 2 Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Padahal, KPU telah mengeluarkan peraturan terkait pemasangan APK dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada Pasal 71 disebutkan, tempat umum yang dilarang ditempel bahan kampanye yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.

Akibat Pembiaran

Pengamat Pemilu sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menjelaskan, gerakan masyarakat itu muncul sebagai wujud frustrasi publik atas dibiarkannya pelanggaran aturan kampanye oleh pemerintah

daerah atau Bawaslu.

Dia menjelaskan, masyarakat jengah dan marah karena aturan kampanye sudah sangat jelas melarang pemasangan bahan kampanye dan alat peraga di pohon. Sebab, masa kampanye Pemilu 2024 saat ini dianggap seperti tanpa aturan dan pengawasan.

“Pemilu seperti tanpa aturan, pengawasan, dan penegakan hukum karena pelanggaran tersebut terjadi di mana-mana. Seolah-oleh memang dibiarkan dan negara beserta institusinya termasuk Bawaslu atau pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi pelanggaran yang dilakukan sangat masif oleh peserta pemilu dan para caleg,” ungkap Titi, Senin, 15 Januari 2024.

Apabila pelanggaran semacam ini tidak segera dikoreksi oleh Bawaslu dan pemda, maka bukan tidak mungkin publik bisa kehilangan kepercayaan kepada pengawas pemilu dan aparat dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum pemilu. Akhirnya masyarakat menjadi tidak sabar dan melakukan caranya sendiri untuk membuat pelanggar jera.

“Seharusnya partai, calon, Bawaslu, dan pemda malu atas gerakan masyarakat tersebut,” tegasnya.

Titi mengatakan, aksi pelanggaran yang dibiarkan tanpa diusut itu sangat buruk bagi kepastian dan keadilan pemilu. Dengan begitu, bukan tidak mungkin bisa mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap proses demokrasi.

“Tentu hal itu sangat disayangkan kalau sampai terjadi,” sambungnya.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini lantas mengajak agar para pemilih menghukum para pelanggar aturan kampanye itu dengan tidak memilihnya dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Saya sendiri mengajak pemilih untuk tegas menghukum calon yang bebal berkampanye di tempat yang dilarang dengan tidak memilih mereka di pemilu mendatang,” imbuh Titi. ●RDO





“Partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat pusat telah menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka”

Idham Holik

INFO
KPU

Minggu III • Januari 2024

23

KAMPANYE AKBAR DIBAGI 3 ZONA

Pasangan capres-cawapres dan partai politik diperbolehkan melakukan Kampanye Akbar atau Rapat Umum mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk memastikan kegiatan yang melibatkan banyak orang itu tidak berdempetan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi pelaksanaannya dalam tiga zona.

Komisioner KPU, August Mellaz, mengatakan, setiap pasangan capres-cawapres akan melakukan Kampanye Akbar di setiap zona secara bergantian. Masing-masing pasangan calon boleh Kampanye Akbar di sebuah zona selama satu hari.

“(Penentuan zona dilakukan) dengan membagi 38 provinsi secara proporsional berdasarkan basis, misalnya WIB, WIT, WITA. Tentu saja setiap paslon itu pasti akan berkampanye di zona masing-masing,” kata Mellaz, Minggu, 14 Januari 2024.

Mellaz memastikan, setiap pasangan capres-cawapres akan mendapat kesempatan sama untuk menggelar kampanye akbar di tiga zona. “Misalnya sekarang paslon tertentu yang di zona A, kemudian paslon berikutnya di zona B, paslon berikutnya di zona C. Itu pada hari yang sama. Besok akan berganti. Jadi semua akan dapat sama,” ujarnya.

Adapun kampanye akbar partai politik, kata dia, pembagiannya mengikuti zona pasangan capres-cawapres yang diusung. Namun, ada empat partai baru yang tidak bisa tercatat secara resmi mengusung pasangan capres-cawapres. Keempat partai itu adalah Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).

Mellaz mengatakan, Partai Gelora telah menyatakan bersedia mengikuti zona yang didapatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Begitu pula Partai Ummat yang bersedia mengikuti zona pasangan nomor urut 01, Anies-Imin. Sedangkan Partai Buruh dan PKN pembagian zonanya diatur tersendiri.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI itu mengatakan, pembagian zona kampanye akbar tersebut merupakan kesepakatan antara pihaknya, perwakilan pasangan capres-cawapres, dan perwakilan partai politik.

Adapun Rapat Umum merupakan salah satu bentuk kampanye yang diatur dalam UU 17/2017 tentang Pemilu. Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu mengatur rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir saat masa tenang dimulai.

Pada aturan turunannya, rapat umum diatur dalam Peraturan KPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan PKPU itu, rapat umum dapat digelar di lapangan, stadion, alun-alun dan tempat terbuka lainnya dengan memerhatikan

daya tampung tempat pelaksanaan.

“Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat,” bunyi Pasal 4 PKPU 15/2023.

Petugas kampanye pemilu rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ke pihak kepolisian sesuai dengan tingkatan. Apabila rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, mereka menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Polda setempat.

Salah satu yang disampaikan dalam pemberitahuan itu ialah estimasi jumlah peserta dan kendaraan bermotor yang turut serta dalam kegiatan. Selanjutnya, bagi peserta yang mengendarai kendaraan bermotor secara rombongan alias konvoi dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Dalam pelaksanaan kampanye, termasuk rapat umum, ada sejumlah larangan yang diatur. Misalnya Mengganggu ketertiban umum, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, tindakan SARA, hingga mengancam penggunaan kekerasan ke pihak lain.

Kampanye juga dilarang melibatkan jajaran hakim Mahkamah Agung (MA) dan hakim di semua badan peradilan di bawah MA serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah juga dilarang ikut serta berkampanye untuk salah satu paslon di pemilu.

Selain itu, aturan ini juga berlaku bagi ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur BI. Lalu, pejabat negara yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, hingga anggota badan permusyawaratan desa.

Dalam pelaksanaan rapat umum, para paslon diperbolehkan memasang alat peraga kampanye, kecuali di lokasi terlarang seperti rumah sakit, tempat ibadah dan lokasi dilarang oleh peraturan.

Dana Kampanye

Masih berkaitan dengan kampanye, terbaru KPU telah merilis rincian total penerimaan dan

pengeluaran laporan awal dana kampanye (LADK) dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

PDIP menjadi partai politik dengan penerimaan dana kampanye terbesar, yakni Rp183 miliar. Jumlah tersebut diketahui dari rilis laporan terbaru dana kampanye 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang diterbitkan KPU, Minggu, 14 Januari 2024.

Berdasarkan data tersebut, dana kampanye terbesar kedua dilaporkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah Rp33 miliar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Rp29 miliar.

Sementara, Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi partai politik yang memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil sebesar Rp301 juta. Lalu, disusul oleh PKN Rp453 juta dan Partai Ummat Rp479 juta.

Menurut anggota KPU, Idham Holik, pihaknya telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan LADK 18 parpol dan akan dituangkan dalam berita acara KPU.

“Setelah menerima LADK perbaikan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi

LADK perbaikan tersebut. Membuat tanda terima dan berita acara hasil pencermatan LADK perbaikan,” kata Idham.

PSI telah melakukan perbaikan data penerimaan dan pengeluaran dalam LADK. Sebelumnya, per tanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat total penerimaan LADK-nya sebesar Rp2 miliar. Sedangkan total pengeluaran LADK PSI sebesar Rp180 ribu. Setelah perbaikan, total penerimaan dana kampanye PSI sebesar Rp33 miliar dan pengeluaran sebesar Rp24 miliar.

Berdasarkan keterangan KPU, perbaikan penyampaian LADK PSI dilakukan pada 12 Januari 2024 pukul 21.35 WIB.

“Partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat pusat telah menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka,” kata Idham.

Logistik Pemilu

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh logistik Pemilu dalam negeri sudah sampai di daerah atau kabupaten/kota pada 15 Januari 2024.

Hasyim mengatakan, untuk logistik Pemilu di luar negeri sudah dikirim lewat pos pada 2-11 Januari 2024. Karena itu, ada beberapa negara melakukan pemungutan suara lebih dulu daripada dalam negeri.

Sementara untuk logistik pemilu dalam negeri, proses cetak surat suara ada yang dilakukan di daerah, ada juga yang terpusat seperti surat suara pemilihan presiden dan DPD.

“Kalau cetak surat suara sudah mendekati 100 persen, tinggal masing-masing percetakan mendistribusikan ke kabupaten/kota, karena alamat posnya dari masing-masing percetakan ke kabupaten/kota, jadi semuanya di Indonesia statusnya distribusi menuju kabupaten/kota,” kata Hasyim usai kegiatan serah terima pinjam pakai gedung pemilu di Denpasar, Bali, Jumat, 12 Januari 2024.

Hingga kini, KPU RI belum menemui kendala dalam proses penyaluran logistik Pemilu. Namun, ada sejumlah temuan kerusakan kotak suara, misalnya di gudang logistik KPU Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan akibat banjir.

Meski demikian, hal tersebut sudah ditangani.

•RDO



“Jadi target kami orang yang masih ragu-ragu, belum mantap setelah melihat performa di debat yang luar biasa itu tentu bisa makin mantap”

Achmad Baidowi



PRABOWO-GIBRAN DEKATI SATU PUTARAN

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat unggul dalam sejumlah survei yang dirilis usai debat ketiga Pilpres 2024. Namun, untuk menang satu putaran rasanya masih jauh.

Dalam beberapa hasil survei, elektabilitas paslon nomor urut 02 ini masih di bawah 50 persen, sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih terus berkejaran.

Berdasarkan survei Ipsos, misalnya, elektabilitas Prabowo-Gibran masih di angka 48,05 persen. Survei ini dilakukan pada periode 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 terhadap 2.000 responden secara tatap muka dengan margin of error 2,19 persen lewat aplikasi Ipsos Ifield yang merupakan System Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI).

Sementara paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin tercatat mendapat angka 21,8 persen dan Ganjar-Mahfud di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,35 persen. Sedangkan responden yang belum menjawab dan belum menentukan pilihan sebesar 11,8 persen.

Data yang hampir sama juga dirilis Media. Survei yang dilakukan pada 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 terhadap 1.500 responden dengan margin of error 2,53 persen, menempatkan Prabowo-Gibran di posisi puncak, yaitu 43,1 persen. Selisih paslon ini dengan rivalnya memang cukup jauh, tapi tetap tidak bisa satu putaran.

Berdasarkan survei Media ini, elektabilitas Anies-Muhaimin tercatat 26,8 persen, sedangkan Ganjar-Mahfud di angka 20,1 persen.

Hasil yang tidak jauh beda juga dirilis Indonesia Public Opinion (IPO), yaitu 42,3 persen untuk elektabilitas Prabowo-Gibran. Lalu, Anies-Muhaimin 34,5 persen dan Ganjar-Mahfud 21,5 persen.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,5 persen lewat metode multistage random sampling selama periode 1-7 Januari 2024.

Dari hasil survei di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa meskipun elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, tapi untuk menang satu putaran masih jauh. Apalagi melihat tren yang selalu naik dari elektabilitas Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud yang juga berupaya

mengejar ketertinggalan.

Melihat data di atas, analisis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai, elektabilitas Prabowo bukan stagnan, tetapi kondisi pemilu saat mulai berupaya merebut ceruk pemilih yang belum menentukan sikap.

“Kalau kita lihat survei hari ini, memang yang diperebutkan oleh ketiga paslon ini undecided voters, artinya yang dulu belum memutuskan,” kata Arifki, Kamis, 11 Januari 2024.

Arifki mengatakan, beragam survei menunjukkan angka Prabowo-Gibran memang tidak sampai 50 persen. Salah satu pemicu, berdasarkan dugaan Arifki, adalah banyak isu yang mulai dibahas di masyarakat. Ketiga paslon mulai bermain isu dan publik mulai melirik pada isu lain.

“Bukan soal gemoy terhenti, tapi karena isu sering berkembang karena paslon Anies main TikTok, Ganjar juga terus bergerak. Artinya tentu isu-isu akan terus berkembang dan tentu proses perebutan-perebutan isu ini yang menyebabkan ada isu viral sekarang menipis dan itu terjadi sampai menjelang pemilihan Februari,” kata Arifki.

Arifki juga melihat, pertempuran sudah murni berebut suara yang belum menentukan sikap. Ia melihat suara Anies, Prabowo, dan Ganjar sudah mulai mentok. Mereka sekarang fokus dalam upaya merebut suara orang yang belum menentukan pilihan atau pemilih yang menyimpan pilihannya di angka sekitar 6 persen.

Pemilih ini bisa saja pemilih kritis atau pemilih yang menggunakan preferensi politik. Jika dilihat untuk Prabowo, maka angka ini cukup realistis untuk membuatnya satu putaran. Di sisi lain, kubu Ganjar

maupun Anies akan bersaing keras untuk mendapatkan tiket kursi juara dua untuk ikut putaran kedua.

Dia

beralasan kondisi saat ini sulit untuk memindahkan pemilih dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Prabowo dipastikan lolos untuk maju putaran kedua, tetapi siapa yang melawan tergantung situasi ke depan.

“Makanya menurut saya kalau memindahkan pemilih loyal dari Ganjar ke Prabowo atau Prabowo ke Ganjar atau Anies ke Ganjar itu susah. Mereka sudah mentok Januari ini, tapi bagaimana pemilih, apa tergolong pemilih ideologis, pemilih kritis atau pemilih yang memang belum memutuskan pilihannya di bulan Januari ini,” kata Arifki.

Kini, kata Arifki, tantangan ada pada ketiga paslon dalam berupaya untuk meraih suara di tengah kemampuan mereka dalam berebut suara yang tidak menentu. “Ini kemampuan ketiga paslon untuk mendapatkan ceruk kecil yang memang menentukan 1 putaran atau di putaran kedua,” kata Arifki.

Sementara itu, analisis politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, meyakini pemilu akan berjalan dua putaran karena ada tiga kandidat dan debat ikut mempengaruhi kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan.

“Impact dari debat tidak terbatas pada arena serta performance dalam debat saja, melainkan juga mengikuti pula pasca-debat. Misal Prabowo yang mengedepankan narasi gemoy, tapi pasca debat tiga malah mengeluarkan diksi yang kurang pantas dan tidak sejalan dengan narasi gemoy,” kata Alvin.

Alvin menilai, serangan negatif wajar dialamatkan kepada paslon dengan elektabilitas tinggi dalam kajian komunikasi politik. Oleh karena itu, wajar bila Anies dan Ganjar menyerang Prabowo.

Alvin menilai, narasi gemoy yang sudah dibuat tetap harus dipertahankan. Ia beralasan, perubahan strategi bisa memicu persepsi berbeda di publik.

Ia mengingatkan debat presiden punya dampak un-

tuk memperlihatkan kesamaan kampanye dengan situasi riil. Jika tampil berbeda, publik bisa saja tidak memilih karena menggerus citra yang terbangun.

“Sebaliknya, dalam dua debat mendatang paslon 01 dan 03 tampak akan lebih gencar memberi serangan negatif. Namun bila terlalu frontal dan fokus menyerang juga akan backfire ke mereka karena memberi anggapan hanya memberi kritik tanpa ada gagasan yang ditawarkan,” kata Alvin.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, menanggapi santai angka mereka yang belum mencapai 50 persen plus 1 untuk satu putaran. Fahri optimistis target akan tetap terpenuhi.

Sementara itu, kubu Timnas AMIN, lewat cawapres Muhaimin Iskandar menegaskan survei bisa saja murni atau survei demi kepentingan kampanye. Bagi dia, hasil survei akan digunakan sebagai alat evaluasi mereka dalam bertindak.

“Ya, kami jadikan masukan saja semua survei itu sebagai indikator kerja kita supaya fokus dan pekerjaan kita terukur, karena itu ya tentu terima kasih, apa pun hasil survei membuat kami lebih punya alternatif cara kerja yang lebih baik,” kata Muhaimin di Surabaya, Rabu, 10 Januari 2024.

Muhaimin hanya memastikan bahwa AMIN membangun komunikasi dengan PDIP. Ia mengaku bahwa ada peluang koalisi dengan PDIP dan partai yang ada di tim Ganjar-Mahfud jika masuk putaran kedua. Namun, semua tergantung hasil pemilu.

“Oh, pasti, semua kita buka peluang untuk koalisi dan tentu masih belum bisa kita putus karena bisa kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua,” kata Muhaimin.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi, menegaskan bahwa mereka akan terus berupaya menunjukkan performa paslon nomor urut 3 dalam rangka meraih simpati publik.

“Jadi target kami orang yang masih ragu-ragu, belum mantap setelah melihat performa di debat yang luar biasa itu tentu bisa makin mantap,” kata Awiek, Kamis, 11 Januari 2024.

Awiek juga mengatakan, mereka melakukan canvassing di darat. Mereka mulai melakukan kegiatan sapa atau door-to-door untuk meyakinkan pemilih agar mencoblos Ganjar-Mahfud. Semua dilakukan demi keyakinan paling tidak bisa membuat Ganjar-Mahfud minimal lolos di putaran kedua.

“Ya kami memperbanyak dan memperkuat koalisi dengan rakyat,” kata Awiek. RDO

